



SALINAN

## WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 57 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dilaksanakan dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. bahwa dalam rangka penerapan standar pelayanan minimal penyelenggaraan pelayanan dasar di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung perlu disusun rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal ditetapkan dalam bentuk Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nornor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nornor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 3);
16. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 51 Tahun 2025 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
7. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

9. Tim Penerapan SPM adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota dalam rangka penerapan SPM Pelayanan Dasar.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## Pasal 2

Penyusunan Renaksi Penerapan SPM dimaksudkan untuk:

- a. menjadi acuan pemenuhan hak Warga Negara terhadap layanan minimal;
- b. menjadi acuan Target Kinerja penyelenggaraan layanan minimal;
- c. menyediakan pembiayaan dalam rangka memenuhi layanan minimal;
- d. pemetaan kondisi dan permasalahan dalam Penerapan SPM;
- e. menyediakan sarana, prasarana, dan sumber daya dalam mewujudkan layanan minimal;
- f. mempercepat pemenuhan layanan minimal; dan/atau
- g. meningkatkan komitmen Perangkat Daerah untuk berperan aktif dalam memberikan layanan minimal.

### Pasal 3

Penyusunan Renaksi Penerapan SPM bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Tim Penerapan SPM dalam melaksanakan:

- a. pemenuhan terhadap jenis layanan minimal; dan
- b. pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan guna pemenuhan urusan wajib Pelayanan Dasar.

## BAB II RENAKSI PENERAPAN SPM

### Pasal 4

Renaksi Penerapan SPM merupakan dokumen perencanaan Program terpadu yang dilaksanakan oleh Tim Penerapan SPM dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar;
- d. pengintegrasian dengan dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD, Renja PD, dan RKA PD;
- e. perumusan strategi dan pemenuhan Penerapan SPM; dan
- f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan SPM.

### Pasal 5

Renaksi Penerapan SPM disusun dengan berpedoman pada RPJMD, Renstra PD, kebijakan, Program, dan Kegiatan Pemerintah Daerah yang terintegrasi pada Perangkat Daerah.

### Pasal 6

- (1) Renaksi Penerapan SPM disusun dengan sistematika:
  - a. Bab I, Pendahuluan.
  - b. Bab II, Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM.
  - c. Bab III, Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM.
  - d. Bab IV, Pemantauan, Evaluasi, dan Penerapan SPM; dan
  - e. Bab V, Kesimpulan dan Saran.
- (2) Uraian mengenai Renaksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengawasan Renaksi Penerapan SPM dilaksanakan oleh Wali Kota;
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Kota dibantu aparat pengawas internal Pemerintah Daerah;
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui audit, reviu, monitoring, evaluasi atau bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya.

- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Desember 2025  
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 30 Desember 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR 57 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA AKSI PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
TAHUN 2025-2029

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimal yang merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang bertujuan memberikan hak pelayanan wajib bagi masyarakat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan jenis mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai amanat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pedoman pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam pasal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Jenis SPM terdiri atas SPM:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum;
- d. perumahan rakyat;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggarannya. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 298 ayat 1 yaitu “Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 14 ayat 2 juga disebutkan bahwa Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 pada Bab IV Pembinaan dan Pengawasan pada Pasal 19 disebutkan bahwa:

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah provinsi secara umum.
- (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang yang sesuai dengan jenis SPM melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah provinsi secara teknis.
- (3) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan SPM provinsi oleh perangkat Daerah provinsi.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah kabupaten/kota secara umum dan teknis.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya.

Dalam rangka perwujudan percepatan dan pencapaian SPM di daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana pada Pasal 21 ayat (2) menyebutkan Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas diantaranya mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota.

## **1.2. Maksud Dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah sebagai berikut:

- 1). Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- 2). Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
- 3). Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
- 4). Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan, sub kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

### 1.3. Kondisi Umum Daerah

#### 1.3.1. Luas dan Batas Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042 luas wilayah Kota Bandung adalah sebesar 16.659 Ha. Letak Geografis Daerah Kota adalah 6° 50' 38" -6° 58' 50" lintang selatan dan 107° 33' 34" -107° 43' 50" bujur timur.

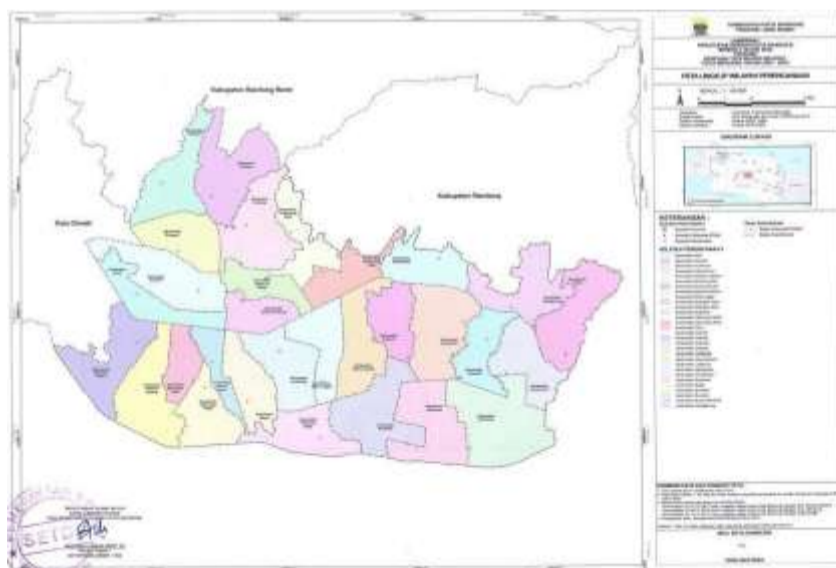
Kota Bandung memiliki batas-batas:

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung;
- b. Sebelah Timur dan Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bandung; dan
- c. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.

Wilayah administrasi Kota Bandung terbagi menjadi 30 kecamatan dan 151 kelurahan, dibantu oleh masyarakat dalam bentuk organisasi Rukun Warga sebanyak 1.531 Rukun Warga (RW) dan 9.473 Rukun Tetangga (RT).

Secara astronomis, Kota Bandung terletak pada 107°36' Bujur Timur dan 6°55' Lintang Selatan. Adapun secara geografis, Kota Bandung berada di bagian tengah "Cekungan Bandung" yang memiliki dimensi luas sebesar 233.000 ha. Dari cekungan ini terletak lima daerah administrasi kabupaten/kota, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan 5 (lima) kecamatan lain dari Kabupaten Sumedang.

**Gambar 1.1**  
**Peta Administrasi Kota Bandung**



Sumber: Perda Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Bandung Tahun 2022-2042

### **1.3.2. Kondisi Topografi**

Kota Bandung berada pada ketinggian 791 m di atas permukaan laut (dpl), dengan titik tertinggi di daerah utara yaitu setinggi 1.050 m dan titik terendah di sebelah selatan dengan ketinggian 675 m di atas permukaan laut. Wilayah Kota Bandung bagian utara memiliki kondisi permukaan tanah (topografi) yang berbukit sedangkan wilayah bagian selatan sampai lajur lintasan kereta api memiliki kontur tanah yang relatif datar.

Secara topografis dan morfologis regional, Kota Bandung terletak pada sebuah basin atau Cekungan Bandung yang dikelilingi oleh berbagai gunung berapi dengan ketinggian rata-rata setinggi 650 m sampai 2.000 m atau lebih. Secara keseluruhan, wilayah cekungan Bandung didominasi oleh daerah datar (kemiringan 0–8%), lalu 21% lainnya merupakan daerah landai (kemiringan 8%–15%), 20% bergelombang (kemiringan lereng 15% - 25%), 12% merupakan daerah curam (kemiringan lereng 25% - 40%), dan 5% terakhir merupakan daerah sangat curam (kemiringan lereng > 40%). Pada dasar cekungan tersebut mengalir Sungai Citarum yang berhulu di Gunung Wayang, Kabupaten Bandung (1.700 m dpl), dengan aliran ke Waduk Saguling dan berujung di Pantai Utara Jawa.

### **1.3.3. Kondisi Hidrologi**

Wilayah Kota Bandung dilewati oleh beberapa sungai besar yaitu 15 Sungai sepanjang 265,05 km, yaitu Sungai Cikapundung, Sungai Cipamokolan, Sungai Cidurian, Sungai Cicadas, Sungai Cinambo, Sungai Ciwastra, Sungai Citepus, Sungai Cibedug, Sungai Curug Dog-dog, Sungai Cibaduyut, Sungai Cikahiyangan, Sungai Cibuntu, Sungai Cigondewah, Sungai Cibeureum, dan Sungai Cinanjur. Sungai-sungai tersebut selain dipergunakan sebagai saluran induk dalam pengaliran air hujan, juga oleh sebagian kecil penduduk masih dipergunakan untuk keperluan MCK (Sumber: DIKPLHD Tahun 2020).

Kota Bandung termasuk dalam Daerah Pengaliran Sungai (DPS) Citarum bagian hulu. Secara nasional, lokasi DPS ini sangat strategis karena merupakan pemasok utama ke Waduk Saguling dan Waduk Cirata yang merupakan sebuah pembangkit tenaga listrik, dan tempat kegiatan penting berlangsung seperti pertanian, dan lain-lain.

Saat ini, kondisi sungai di Kota Bandung sebagian besar telah mengalami pencemaran. Tidak tegasnya regulasi yang ada terhadap pengelolaan limbah pabrik menjadi salah satu penyebab tercemarnya sungai. Selain itu, penurunan kualitas air sungai juga disebabkan oleh pembuangan air kotor oleh warga. Padahal Sungai Cikapundung merupakan salah satu sungai penting yang membelah Kota Bandung dan saat ini justru banyak kehilangan fungsi ekologisnya.

#### 1.3.4. Demografi

Jumlah penduduk Kota Bandung sebanyak 2.579.837 jiwa, dengan rincian kondisi penduduk dapat diuraikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.1**  
**Struktur Penduduk Kota Bandung Tahun 2024**

No	Uraian	2024			
1.	Jumlah Penduduk	2.591.763			
2.	Komposisi Penduduk, menurut:				
	a	Jenis Kelamin			
	-	Pria	1.298.551		
	-	Wanita	1.293.212		
	b	Struktur Usia			
	-	>75	Pria	Perempuan	Jumlah
	-	>75	48,9	69,2	118,1
	-	70 – 74	53,9	59,8	113,6
	-	65 – 69	81,5	90,4	171,9
	-	60 – 64	106,9	117,7	224,6
	-	55 – 59	141,5	148,1	289,6
	-	50 – 54	168,3	171,2	339,5
	-	45 – 49	190,2	190,8	381,0
	-	40 – 44	206,3	202,9	409,2
	-	35 – 39	181,7	177,9	359,6
	-	30 – 34	194,1	194,3	388,5
	-	25 – 29	203,5	199,9	403,3
	-	20 – 24	218,1	207,9	426,0
	-	15 – 19	198,7	189,9	388,6
	-	10 – 14	220,5	207,1	427,6
	-	5 – 9	214,8	201,4	416,1
	-	0 – 4	162,4	151,9	314,2

Sumber: LKPJ Kota Bandung Tahun 2024

**Tabel 1.2**  
**Jumlah dan Komposisi Penduduk Kota Bandung Tahun 2020-2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk (jiwa)	2.500.965	2.527.854	2.545.005	2.569.107	2.591.763
Rata-rata Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	14.948	15.109	15.190	15.355	15.491
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,82	1,07	0,68	0,94	0,94
Laki - Laki (orang)	1.256.205	1.267.661	1.275.897	1.287.427	1.298.551
Perempuan (orang)	1.256.205	1.260.193	1.269.108	1.281.680	1.293.212
Bekerja (orang)	1.167.849	1.185.623	1.298.537	1.202.485	1.254.600
Pengangguran (orang)	147.081	153.505	137.098	116.430	100.310
Pengangguran (%)	11,19	11,46	9,55	8,83	7,40
Tidak Mempunyai Ijazah (%)	4,37	2,00	2,79	2,40	17,09
SD/MI/ Sederajat (%)	17,74	15,52	17,25	16,99	20,45
SMP/MTs/ Sederajat (%)	20,82	20,62	21,62	22,37	13,30
SLTA/ Sederajat (%)	40,67	37,16	58,34	58,24	32,45
Perguruan Tinggi (%)	11,78	14,78	N/A	N/A	16,71

Sumber: LKPJ Kota Bandung Tahun 2024

### 1.3.5. Kawasan Rawan Bencana

Kota Bandung berada di Cekungan Bandung yang dikelilingi oleh gunung berapi yang masih aktif dan berada di antara 3 (tiga) daerah sumber gempa bumi yang saling melingkup, yaitu (i) episentrum gempa Sukabumi-Padalarang-Bandung, (ii) episentrum gempa Bogor-Puncak-Cianjur, serta (iii) episentrum gempa Garut-Tasikmalaya-Ciamis. Daerah-daerah tersebut berada di sepanjang sesar-sesar aktif, sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi gempa tektonik. Selain itu, Kota Bandung memiliki jumlah penduduk dan kepadatan yang cukup serta kerapatan bangunan yang cukup tinggi sehingga berisiko tinggi pada berbagai bencana yang terjadi.

Kota Bandung memiliki ancaman kondisi geologis yang sangat besar karena dikelilingi patahan (sesar/*fault*) dari 3 (tiga) penjurur, setiap sesar menyimpan potensi gempa. Di utara Sesar Lembang, di barat patahan Cimandiri, dan di selatan patahan dengan jalur Baleendah dan Ciparay hingga Tanjung Sari. Selain itu, dasar Cekungan Bandung memiliki tingkat sedimentasi yang tinggi sehingga akan memberikan efek yang lebih besar apabila terkena rambat gelombang gempa. Sedimentasi tertinggi terdapat di Kawasan Cibiru, Gedebage, Soekarno-Hatta, dan Tol Purbaleunyi. Beberapa wilayah rawan bencana di Kota Bandung yang teridentifikasi antara lain:

- a. Daerah rawan banjir, diantaranya: di utara jalan tol Purbaleunyi dan 68 (enam puluh delapan) lokasi; terutama daerah-daerah yang dilewati oleh 5 (lima) aliran sungai, yaitu aliran Sungai Cipaku, Cikapundung, Cibeunying, Cipamokolan, dan Cipadung.
- b. Daerah rawan bencana gempa bumi, diantaranya: Bandung Kulon, Bandung Wetan, Batununggal, Bojongloa Kaler, Cicendo, Cinambo, Coblong, Kiaracandong, Lengkong, Regol, Sukajadi, Sukasari dan Sumur Bandung.
- c. Daerah rawan longsor, diantaranya: Cibiru, Mandalajati, Ujungberung, Cibeunying Kaler, Cidadap, dan Coblong.
- d. Daerah rawan kebakaran di permukiman padat, diantaranya: Kecamatan Babakan Ciparay dan Cicendo yang merupakan kecamatan dengan jumlah kejadian yang

- terbanyak, kemudian disusul Kecamatan Astana Anyar, Bandung Kidul, Bandung Wetan, Sukajadi, Bandung Kulon, Batununggal, Bojongloa Kaler, Cibeunying Kidul, dan Cibiru.
- e. Daerah rawan bencana letusan gunung berapi, diantaranya Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cidadap, Cobleng, dan Cibeunying Kaler.

Kawasan rawan bencana terdiri atas:

- a. Kawasan rawan gerakan tanah/longsor yaitu Kawasan rawan gerakan tanah/longsor berupa kawasan gerakan tanah tinggi yang tersebar di bagian Utara Kota seluas lebih kurang 20,06Ha.
- b. Kawasan rawan genangan banjir yaitu Kawasan rawan banjir tersebar di seluruh wilayah Kota meliputi 68 titik genangan.
- c. Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi yaitu Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi merupakan kawasan rawan aliran lahar hujan di sepanjang Sungai Cibeurem dan Sungai Cikapundung seluas lebih kurang 40,42 (empat puluh koma empat dua) Ha.

Ketentuan khusus penanganan kawasan rawan bencana dilakukan melalui upaya pengurangan risiko bencana sesuai dengan karakteristik jenis bencananya. Indikasi Program pada Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042 terkait Penanganan kawasan rawan bencana tersusun dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1.3**  
**Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana di Kota Bandung**

No.	Ketentuang Khusus Kawasan Rawan Bencana	
1	Rawan bencana gerakan tanah dan longsor	<p>a. pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota yang dapat mengganggu kestabilan lereng dan meningkatkan potensi terjadinya gerakan tanah;</p> <p>b. pelarangan pendirian bangunan hunian pada lahan dengan kemiringan lereng lebih dari 30% (tiga puluh persen) atau di bawah tebing;</p> <p>c. pengendalian kegiatan Pemanfaatan Ruang Kota yang menggunakan air dalam jumlah besar yang dapat mengakibatkan peningkatan beban pada lahan;</p> <p>d. pemanfaatan lahan untuk pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilengkapi dengan terasering dan tanaman penguat tebing;</p> <p>e. semua unit bangunan harus dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton bertulang yang</p>

No.	Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana	
		memiliki kekuatan sesuai menahan longsor dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran; f. pembangunan jaringan drainase yang sesuai kemiringan lereng dan kondisi tanah pada jaringan jalan dan kawasan terbangun; g. pengembangan rekayasa teknis untuk mengurangi risiko bencana gerakan tanah; dan h. pemasangan papan informasi bahaya, rambu bahaya dan jalur evakuasi.
2	Rawan bencana genangan banjir	a. pengendalian Kawasan Budi Daya terbangun di kawasan rawan banjir; b. penerapan upaya pengurangan risiko bencana banjir; dan c. pemasangan sistem peringatan dini, papan informasi dan rambu peringatan dan jalur evakuasi.
3	Rawan bencana letusan gunung api	a. kawasan aliran lahar dingin; b. pemasangan papan informasi bahaya, rambu dan jalur evakuasi; c. diperbolehkan kegiatan yang bersifat pengamatan, bangunan pengendalian bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana atau infrastruktur jaringan listrik, energi, air bersih, jalan, jembatan dan infrastruktur kota lainnya untuk kepentingan umum sesuai hasil kajian risiko bencana

Sumber: Perda 5 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Bandung Tahun 2022-2042

### 1.3.6. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Potensi unggulan daerah mengacu pada sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur dan faktor lain yang dimiliki oleh suatu wilayah atau daerah yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah tersebut. Potensi unggulan daerah dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu wilayah karena dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Dalam pengembangan potensi unggulan daerah, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk memaksimalkan potensi-potensi tersebut dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pengembangan potensi unggulan daerah juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Untuk dapat memanfaatkan potensi unggulan daerah dengan baik, perlu dilakukan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan investor. Hal ini penting agar potensi unggulan daerah dapat dikembangkan secara berkelanjutan, mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Dalam konteks ini, potensi unggulan daerah yang dikembangkan secara optimal dapat meningkatkan daya saing daerah dan mendorong investasi untuk masuk ke wilayah tersebut. Selain itu, potensi unggulan daerah dapat menjadi basis pengembangan industri dan pariwisata yang dapat memberikan dampak positif pada perekonomian lokal.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui potensi unggulan suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), salah satu indikator penting dalam mengukur kesehatan ekonomi suatu daerah. PDRB mengukur nilai total dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah daerah dalam periode tertentu.

PDRB juga dapat digunakan untuk menilai kemajuan ekonomi suatu daerah dari waktu ke waktu dan membandingkannya dengan daerah lain. Selain itu, PDRB dapat digunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya dan anggaran di daerah.

PDRB yang tinggi menunjukkan bahwa daerah memiliki aktivitas ekonomi yang kuat dan berkembang, maka daerah tersebut akan memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk mengembangkan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor penting lainnya. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Namun, PDRB sendiri tidak cukup untuk menilai kesehatan ekonomi suatu daerah secara menyeluruh.

**Tabel 1.4**  
**PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2020–2024**

KBLI	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	173,71	171,98	171,48	168,33	176,16
B	Pertambangan dan Penggalan	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	38.204.352,60	39.247,99	40,283.92	41.196,68	41.511,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	159.088,10	168,74	179,24	184,18	186,79
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	293.363,00	315,84	311,61	306,93	316,99
F	Konstruksi	15.959.041,90	16.681,87	16,619.30	17.247,51	18.021,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	50.409.940,60	51.772,63	54,261.26	56.411,59	59.462,37
H	Transportasi dan Pergudangan	10.987.442,00	10.756,43	12,139.21	13.205,91	14.442,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.084.902,00	8.179,17	9,319.18	9.857,75	10.598,37
J	Informasi dan Komunikasi	35.402.321,00	38.875,29	42,350.57	46.170,59	49.195,45
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10.551.962,50	10.733,59	10,607.74	10.782,02	11.119,88
L	Real Estate	2.513.828,80	2.758,09	2,919.72	3.048,40	3.214,29
M,N	Jasa Perusahaan	1.442.418,80	1.516,41	1,673.78	1.791,44	1.882,77
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.267.386,80	4.252,02	4,175.10	4.208,92	4.602,72

P	Jasa Pendidikan	6.399.912,20	6.468,39	6,787.30	7.132,10	7.434,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.957.087,00	2.131,10	2,362.47	2.582,51	2.809,49
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6.338.198,60	6.384,47	7,087.49	7.674,27	8.078,81
	<b>PDRB</b>	<b>193.144.954,00</b>	<b>200.414,03</b>	<b>211.249,37</b>	<b>221.969,13</b>	233.053,79

Sumber: BPS Kota Bandung, 2024

**Tabel 1.5**  
**PDRB Kota Bandung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2020–2024**

KBLI	Uraian	2020	2021	2022	2032	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	287.420	291,89	306,12	308,98	346,02
B	Pertambangan dan Pengalihan	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	55.095.637	57.998,39	62,480.78	65.798,01	68.024,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	243.706	260,36	292.07	303,45	307,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	542.691	590,08	802.17	645,81	751,97
F	Konstruksi	23.988.716	25.485,81	27,531.36	28.926,83	28.708,28
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	71.852.505	75.215,10	83,429.30	88.962,86	97.874,57
H	Transportasi dan Pergudangan	21.124.540	20.142,82	25,446.76	28.263,78	97.874,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12.466.036	13.021,74	15,487.99	16.593,61	17.885,09
J	Informasi dan Komunikasi	40.322.793	43.934,97	47,324.83	51.607,61	52.383,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	18.158.071	19.012,22	20,427.51	21.350,20	21.949,95
L	Real Estate	3.329.273	3.664,30	3,990.05	4.222,43	4.408,25
M,N	Jasa Perusahaan	2.414.318	2.579,60	3,035.58	3.335,71	3.509,98
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.845.261	7.931,48	7,762.18	7.881,72	8.551,29
P	Jasa Pendidikan	12.223.039	12.718,64	13,541.86	14.523,74	16.328,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.303.347	3.662,65	4,098.26	4.608,72	5.252,74
R,S,T,U	Jasa Lainnya	10.419.283	10.606,21	12,360.76	13.950,99	15.990,62
	<b>PDRB</b>	<b>283.616.64</b>	<b>297.116,26</b>	<b>328,317.61</b>	<b>351.284,45</b>	<b>371.845,62</b>

Sumber: BPS Kota Bandung, 2024

**b. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi dalam suatu

perekonomian dalam jangka waktu tertentu, yang diukur dengan perubahan Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi dapat dinyatakan dalam persentase perubahan PDB dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan bahwa suatu perekonomian sedang berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung selama periode tahun 2018–2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

**Grafik 1.1**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bandung Tahun 2019–2023 dan Perbandingannya dengan Jawa Barat dan Nasional**



Berita Resmi Statistik Kota Bandung- 28 Februari 2024

Sumber: BPS Kota Bandung, BPS Jawa Barat, dan BPS Pusat ,2023

Pasca pandemi Covid 2019 LPE Kota Bandung mengalami peningkatan menjadi 3,76 ditahun 2021 dari tahun sebelumnya sebesar -2,28. Pada tahun 2022 LPE Kota Bandung masih mengalami peningkatan menjadi 5,41. Akan tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,38 sebesar 5,07. Namun demikian pertumbuhan ekonomi Kota Bandung secara umum selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan Indonesia.

## **1.2. Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM**

Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan oleh tim penerapan SPM untuk dilakukan dan/atau diselesaikan, sehingga pelayanan dasar minimal dapat dirasakan oleh masyarakat.

Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM.

Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Rencana Aksi SPM Daerah adalah memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim penerapan SPM dalam merumuskan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM, sehingga rumusan strategi Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan suatu rangkaian hubungan yang saling mempengaruhi.

Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan, maka diperlukan konsistensi Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan Tim Penerapan SPM Daerah untuk memastikan dan mengawal bahwa:

1. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran.
2. Penerapan SPM Daerah terindegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya.
3. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

**BAB II**

**KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN SPM**

**2.1. Kondisi Pemenuhan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

**2.1.1. Bidang Pendidikan**

Kondisi pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 ada pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Kondisi Capaian Penerapan SPM Bidang Pendidikan**

KOTA	SPM Bidang Pendidikan									Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI			PENDIDIKAN DASAR			PENDIDIKAN KESETARAAN				
	Usia 5 (Lima) tahun sampai dengan 6 (Enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (Delapan Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BANDUNG	51.300	51.300	100	325.166	325.166	100	7.683	7.683	100	688.011.018.082	656.754.713.911

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Bandung Tahun 2024

**2.1.2. Bidang Kesehatan**

Kondisi pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 ada pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Kondisi Capaian Penerapan SPM Bidang Kesehatan**

KOTA	SPM Bidang Kesehatan																	
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
BANDUNG	37.591	36.851	98.03	37.591	34.869	92.76	35.967	34.190	95.06	141.819	141.702	99.92	333.086	312.555	93.84	736.411	736.411	100

SPM Bidang Kesehatan														
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut			Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis		
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Jumlah Orang Terlayani	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
193.397	189.568	98.02	231.130	231.130	100	42.042	42.042	100	3.597	3.597	100	53.615	53.615	100

SPM Bidang Kesehatan				
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus Yang Bersifat Peningkatan/Promotif dan Pencegahan/ Preventif.			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
35	36	37	38	39
41.454	41.454	100	16.560.161.924	14.079.071.869

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Bandung Tahun 2024

### 2.1.3. Bidang Pekerjaan Umum

Kondisi pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 ada pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Kondisi Capaian Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum**

KOTA	SPM Bidang Pekerjaan Umum						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari			Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BANDUNG	19.881	19.881	100	1.773	1.773	100	23.599.029.453	23.315.965.479

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Bandung Tahun 2024

### 2.1.4. Bidang Perumahan Rakyat

Kondisi pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 ada pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Kondisi Capaian Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat**

KOTA	SPM Bidang Perumahan Rakyat						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah			Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BANDUNG	352	352	100	60	60	100	3.306.000.000	3.120.968.707

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Bandung Tahun 2024

**2.1.5. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**

Kondisi pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 ada pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Kondisi Capaian Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**

KOTA	SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BANDUNG	246	246	200	963.832	963.832	100	1.600	1.600	100	114	114	100	353	353	100,00	55.629.743.133	54.594.535.816

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Bandung Tahun 2024

### 2.1.6. Bidang Sosial

Kondisi pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 ada pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Kondisi Capaian Penerapan SPM Bidang Sosial**

KOTA	SPM Bidang Sosial															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Daerah				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BANDUNG	873	873	100	174	174	100	412	412	100	495	495	100	8.041	8.041	100	6.501.725.146	6.255.001.580

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Bandung Tahun 2024

### 2.2. Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam rangka pemenuhan pencapaian penerapan SPM di Kota Bandung ditemukan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

#### 2.2.1. Bidang Pendidikan

Untuk mengetahui permasalahan pemenuhan penerapan SPM dan penyempurnaan kebijakan penerapan SPM. Koordinasi juga dilakukan dengan Pemerintah Pusat terkait kebijakan dan arahan Pemerintah Pusat dalam penerapan SPM di Daerah. Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan diketahui bahwa pelayanan dasar SPM bidang Pendidikan masih menemui berbagai permasalahan sebagai berikut:

- 1) Data dan Informasi tersebar di beberapa Instansi/Lembaga/ Masyarakat sehingga membutuhkan proses pengumpulan data yang Panjang dan verifikasinya. Selain itu, ada beberapa Lembaga yang dikelola oleh masyarakat dan belum terdaftar di Dinas pendidikan.

- 2) Data dan kualitas data yang terinput di dalam Aplikasi Dapodik (Data Pokok Kependidikan) yang menjadi data acuan dalam kependidikan masih belum terinput dengan baik oleh Sekolah.
- 3) Tidak adanya peraturan untuk mewajibkan anak usia 5-6 tahun bersekolah di pendidikan PAUD.
- 4) Kurangnya partisipasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di PAUD.
- 5) Terbatasnya tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualifikasi S1/DIV pada pendidikan PAUD.

### **2.2.2. Bidang Kesehatan**

Untuk mengetahui permasalahan pemenuhan penerapan SPM dan penyempurnaan kebijakan penerapan SPM.

Koordinasi juga dilakukan dengan Pemerintah Pusat terkait kebijakan dan arahan Pemerintah Pusat dalam penerapan SPM di Daerah. Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan diketahui bahwa pelayanan dasar SPM bidang kesehatan masih menemui berbagai permasalahan sebagai berikut:

#### **1) Pelayanan kesehatan ibu hamil**

- a. Sasaran yang digunakan masih sasaran proyeksi sehingga tidak sesuai kondisi yang sebenarnya di lapangan.
- b. Pengetahuan dan pemahaman ibu serta keluarga mengenai pemeriksaan kehamilan secara teratur masih perlu ditingkatkan.
- c. Pelibatan lintas sektor terutama di kewilayahan, dalam hal pendataan dan penggerakkan sasaran belum optimal.
- d. Pencatatan dan pelaporan belum mencakup hasil pelayanan dari Fasyankes swasta maupun pelayanan kesehatan lintas batas.

#### **2) Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin**

- a. Sasaran yang digunakan masih sasaran proyeksi sehingga tidak sesuai yang sebenarnya di lapangan.

- b. Sistem pencatatan dan pelaporan belum optimal, tidak semua Fasyankes swasta melaporkan hasil pelayanannya ke Dinas Kesehatan melalui Puskesmas.
- c. Dukungan LP/LS dalam penyelenggaraan pelayanan persalinan belum optimal.
- d. Sistem rujukan berjenjang dalam pelayanan persalinan belum terselenggara dengan optimal.
- e. Belum semua ibu hamil dan bersalin mengetahui mengenai jaminan kesehatan nasional.

### **3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**

- a. Pengetahuan dan pemahaman ibu serta keluarga mengenai pemeriksaan kesehatan bayi baru lahir secara teratur masih perlu ditingkatkan.
- b. Pelibatan LP/LS dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir belum optimal.
- c. Sistem pencatatan dan pelaporan belum optimal, tidak semua Fasyankes swasta melaporkan hasil pelayanannya ke Dinas Kesehatan melalui Puskesmas.

### **4) Pelayanan Kesehatan Balita**

- a. Partisipasi masyarakat dalam pemantauan pertumbuhan masih rendah sehingga tidak dapat memenuhi syarat penimbangan minimal 8 kali per tahun.
- b. Jumlah SDM Puskesmas untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan balita relatif kurang Dukungan LP/LS dalam pemantauan kesehatan balita belum optimal.
- c. Sistem pencatatan dan pelaporan di Puskesmas belum optimal, pemanfaatan kohort balita belum maksimal.

**5) Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar**

- a. Sasaran usia pendidikan dasar (7- 15 tahun) dengan menggunakan proyeksi dari Disdukcapil dinilai kurang tepat dijadikan denominator/penyebut untuk SPM Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar. Hal ini dikarenakan sasaran Disdukcapil disebar berdasarkan keberadaan/domisili penduduk, sementara usia pendidikan dasar sebagian besar berada di sekolah/madrasah yang lokasinya berbeda dari domisili sasaran.
- b. Ketersediaan Buku Rapor Kesehatanku belum sesuai dengan jumlah peserta didik di sekolah/madrasah.
- c. Jumlah SDM Puskesmas relatif kurang untuk pengelolaan upaya pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar.
- d. Penanggung jawab SPM Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar di Puskesmas cenderung cepat berganti orang setiap tahunnya.

**6) Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut**

- a. Ketersediaan anggaran skrining lansia yang terbatas, hanya dapat memenuhi 40% dari kebutuhan yaitu utk penyediaan bahan pemeriksaan gula darah, sedangkan untuk pemeriksaan kolesterol tidak ada.
- b. Partisipasi lansia utk pemeriksaaan kesehatan masih belum maksimal akibat pemahaman mengenai pentingnya skrining lansia masih rendah serta ketidaktersediaan pendamping yang mengantar lansia ke lokasi pelayanan.
- c. Dukungan lintas sektor terutama di kewilayahan dalam penggerakkan sasaran lansia belum optimal.
- d. Kurangnya SDM di Puskesmas untuk melakukan pelayanan kesehatan lansia sesuai standar.

- e. Pelibatan Fasyankes swasta dalam pelayanan kesehatan lansia masih rendah, tidak semua Fasyankes swasta dapat melaporkan hasil pelayanan lansia sesuai standar.
- f. Pencatatan dan pelaporan di Puskesmas belum optimal.

**7) Pelayanan kesehatan Usia Produktif**

- a. Masih belum optimalnya keterlibatan sektor lain di luar bidang kesehatan dalam menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan sesuai indikator SPM bidang kesehatan.
- b. Meningkatkan advokasi dan sosialisasi kepada lintas sektor terkait mengenai pentingnya Belum semua Puskesmas / Fasyankes lengkap memiliki tenaga kesehatan terampil (kompetensi) untuk pelayanan deteksi dini kanker pada wanita sebagai bagian dari pelayanan kesehatan usia produktif.
- c. Kurangnya SDM pelaksana di UPTD Puskesmas dibandingkan banyaknya program kesehatan dan banyaknya sistem pencatatan dan pelaporan program kesehatan yang
- d. harus dikerjakan.

**8) Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi**

**9) Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus**

- a. Masih kurangnya upaya peningkatan kepatuhan masyarakat untuk berobat secara teratur.
- b. Belum ada sistem /aplikasi di tingkat Dinas Kesehatan yang bisa menghimpun capaian SPM dari seluruh fasyankes, sehingga menjadi kendala dalam perekapan data SPM karena kurangnya jumlah SDM.
- c. Belum semua fasyankes swasta (Klinik Pratama, Klinik Utama, Rumah Sakit) menyampaikan laporan hasil pelayanan kesehatan secara lengkap dan tepat waktu.

**10) Pelayanan kesehatan ODGJ berat**

- a. Belum optimalnya pembentukan dan pembinaan Kelurahan siaga sehat jiwa dalam penanganan masalah ODGJ berat di tingkat kelurahan.
- b. Sangat terbatasnya Fasyankes Rujukan Tingkat Lanjut yang menyediakan pelayanan rawat inap ODGJ berat di Kota Bandung.

**11) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**

- a. Aplikasi SITB sering terkendala akses masuk sehingga input data dari Faskes tidak bisa tepat waktu DPM / Klinik Swasta yang berjejaring dengan Puskesmas maupun Dinas Kesehatan masih rendah.
- b. Di beberapa Puskesmas terkendala karena tidak adanya Petugas Analis maupun ketersediaan Mikroskop.
- c. Kebijakan Nasional yang tidak diiringi dengan kesiapan logistik Belum adanya dukungan pembiayaan dari BPJS terkait rujukan pasien untuk pemeriksaan penunjang baik untuk penegakan diagnosis terutama untuk Terduga TBC Klinis yang membutuhkan pemeriksaan penunjang selain TCM misalnya RO atau PA dsb (selama ini pasien TBC harus dirujuk penuh sebagai pasien yang Pindah Pengobatan) serta rujukan pemeriksaan penunjang untuk skrining dalam rangka pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis yang membutuhkan akses untuk RO sebagai sarana skrining.

**12) Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus Yang Bersifat Peningkatan/Promotif dan Pencegahan/ Preventif.**

- a. Stigma terhadap test HIV Kelompok risiko yang bersifat *Hidden Population*.
- b. Keterlibatan Perangkat Daerah dan *Stakeholder* lainnya dalam deteksi dini masih rendah.
- c. Mobilitas Populasi kunci yang sangat tinggi Regulasi Test HIV pada populasi remaja (anak) masih memerlukan persetujuan wali untuk *test* Tidak ada Regulasi terkait *reward* dan *Punishment* terhadap Faskes yang tidak menjalankan test HIV.

**2.2.3. Bidang Pekerjaan Umum**

Untuk mengetahui permasalahan pemenuhan penerapan SPM dan penyempurnaan kebijakan penerapan SPM. Koordinasi juga dilakukan dengan Pemerintah Pusat terkait kebijakan dan arahan Pemerintah Pusat dalam penerapan SPM di Daerah. Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan diketahui bahwa pelayanan dasar SPM bidang pekerjaan umum masih menemui berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Belum terintegrasinya data jumlah bangunan hunian/rumah, data kualitas air, data jumlah kumulatif masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum (by name by address) yang akurat.
2. Terbatasnya lahan milik Pemerintah Kota Bandung di wilayah penerima manfaat, sehingga tidak dapat dilakukan pembangunan sarana air bersih.
3. Tampungannya air baku yang belum terisi maksimal mengakibatkan sumber air baku Perumda Tirtawening mengalami penurunan.

4. Adanya ancaman kekurangan air bersih akibat fenomena el nino;
5. Jumlah warga yang tersambung jaringan perpipaan air minum ke Perumda Tirtawening masih terbatas;
6. Alih fungsi lahan sehingga mengakibatkan kurangnya imbuhan air tanah pada wilayah tangkapan air;
7. Terjadinya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di sekitar mata air;
8. Sedimentasi yang mulai meninggi di Situ Cipanunjang dan Situ Cileunca yang mengakibatkan sulitnya mengolah air baku.
9. Kurangnya imbuhan air tanah pada wilayah tangkapan air karena tingginya alih fungsi lahan.
10. Sumber air baku berada di luar wilayah Kota Bandung memerlukan peran dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.
11. Belum terintegrasinya data yang akurat meliputi data:
  - a. Jumlah jarak sumber air ke penampungan tinja/limbah.
  - b. Jumlah sarana pembuangan air limbah *grey water* rumah tangga yang digunakan masyarakat tiap kepala keluarga (BNBA).
  - c. Jumlah Sarana Pembuangan *black water* dan *grey water* terpisah/ bergabung yang digunakan masyarakat tiap kepala keluarga (BNBA).
  - d. Jumlah Rumah Tangga yang pengolahan air limbahnya rutin di sedot oleh truk tinja yang digunakan masyarakat tiap kepala keluarga (BNBA).
  - e. Pembangunan tangki septik masih belum optimal karena sebagian besar pembuangan air limbah terutama limbah rumah tangga dibuang ke badan air/sungai.

- f. Kepemilikan tangki septik dan sarana pengolahan limbah lainnya yang belum memadai.
- g. Padatnya permukiman sehingga menyulitkan pembangunan sarana pengolahan air limbah baik *on-site* maupun *off-site*.

#### **2.2.4. Bidang Perumahan Rakyat**

Untuk mengetahui permasalahan pemenuhan penerapan SPM dan penyempurnaan kebijakan penerapan SPM. Koordinasi juga dilakukan dengan Pemerintah Pusat terkait kebijakan dan arahan Pemerintah Pusat dalam penerapan SPM di Daerah. Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan diketahui bahwa pelayanan dasar SPM bidang perumahan rakyat masih menemui berbagai permasalahan yaitu penanganan rumah tidak layak huni (rutilahu) akibat bencana berdasarkan usulan atau kejadian yang dilaporkan oleh unsur kewilayahan sangat banyak namun tidak semua usulan dapat terlaksana karena tidak memenuhi persyaratan administrasi seperti bukti kepemilikan lahan/sertifikat hak milik.

#### **2.2.5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat**

Untuk mengetahui permasalahan pemenuhan penerapan SPM dan penyempurnaan kebijakan penerapan SPM. Koordinasi juga dilakukan dengan Pemerintah Pusat terkait kebijakan dan arahan Pemerintah Pusat dalam penerapan SPM di Daerah. Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan diketahui bahwa pelayanan dasar SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat masih menemui berbagai permasalahan sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM
- 2) Kurangnya SDM dilapangan dalam melaksanakan penanganan bencana.
- 3) Kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempengaruhi terhadap kinerja Perangkat Daerah.

- 4) Minimnya anggaran dalam menunjang kegiatan khususnya dibidang tanggap darurat dan penanggulangan.
- 5) Belum optimalnya penerapan dan penegakan Perda yang telah ditetapkan.
- 6) Belum adanya data tentang daerah rawan bencana yang memadai.
- 7) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
- 8) Dalam pengumpulan data, lokasi penertiban pelanggaran Perda dan Perkada tidak dapat ditargetkan karena bersifat kasuistik.
- 9) Belum dibentuk tim appraisal penghitungan kebutuhan terkait pemenuhan pelayanan dasar, sehingga masih terkendala dalam penghitungan kebutuhan.
- 10) Belum tersedianya komponen belanja yang fleksibel untuk digunakan dalam proses penganggaran terutama dalam pelayanan pergantian materil maupun pengobatan bagi WN yang terkena dampak dari penegakan Perda/Perkada.
- 11) Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pembentukan dan pembinaan kelurahan Tangguh bencana dan kebakaran.
- 12) Terbatasnya sarana dan prasarana mitigasi bencana dan sistem proteksi kebakaran yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk, gedung dan luas wilayah.
- 13) Organisasi Satuan Relawan Kebakaran (Satwankar) belum tertata dengan baik dan diberdayakan secara optimal.
- 14) Kurangnya sumber air/hidran di Kota Bandung khususnya di permukiman padat penduduk sehingga penanggulangan kebakaran menjadi tidak maksimal.
- 15) Potensi ancaman gempa bumi yang berasal dari Sesar Lembang, Sesar Cimandiri, dan Sesar Ciparay-Baleendah.
- 16) Kondisi Morfologi berada di tengah Cekungan Bandung dan kondisi Hidrologi yang dilewati 11 sungai membuat potensi banjir cukup tinggi.

- 17) Jumlah penduduk Kota Bandung yang padat yaitu sebesar 2.444.160 jiwa membuat lahan permukiman juga padat sehingga kejadian kebakaran berpotensi tinggi serta berpotensi juga menjadi korban bencana alam seperti gempa dan banjir.
- 18) Masih banyaknya wilayah kumuh di beberapa wilayah Kota Bandung yang belum memiliki sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
- 19) Akses jalan yang sempit di permukiman padat.
- 20) Belum meratanya pengetahuan masyarakat dan badan usaha tentang potensi bahaya kebakaran di permukiman dan bahan berbahaya dan beracun (B3) yang biasanya terjadi di lingkungan industri dan perdagangan.

#### **2.2.6. Bidang Sosial**

Untuk mengetahui permasalahan pemenuhan penerapan SPM dan penyempurnaan kebijakan penerapan SPM.

Koordinasi juga dilakukan dengan Pemerintah Pusat terkait kebijakan dan arahan Pemerintah Pusat dalam penerapan SPM di Daerah. Dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan diketahui bahwa pelayanan dasar SPM bidang sosial masih menemui berbagai permasalahan sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat inclusion dan exclusion error pada data kemiskinan, dimana pada tahun 2023 Dinas Sosial telah melakukan verifikasi dan validasi data sebanyak 45.000 orang dan ditemukan hasil sebagai berikut:
  - a. *Inclusion Error* sebanyak 3.256 data atau sebesar 7.84%.
  - b. *Exclusion Error* sebanyak 9.840 data atau sebesar 21.87%.
- 2) Kesulitan bagi sasaran SPM untuk memperoleh layanan kesehatan yang bersumber dari APBD Kota Bandung dikarenakan tidak diketahuinya identitas dari Klien.
- 3) Terdapat penolakan dari pejabat wilayah setempat (RT/RW) untuk memfasilitasi pembuatan Adminduk bagi PPKS terlantar.
- 4) Tidak adanya kewenangan bagi Dinas Sosial untuk merekrut tenaga kesehatan.

### **BAB III**

#### **STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM**

Dalam memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kota Bandung memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM yaitu melalui Strategi dan Arah Kebijakan.

#### **3.1. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi**

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi Pemenuhan SPM Perangkat Daerah pengampu dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai berikut:

##### **3.1.1. SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pencapaian Bidang Pendidikan sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**pencapaian Bidang Pendidikan**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU	Ruang
			2 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
			3 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang
			4 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			5 Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU	Ruang
			6 Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
			7 Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang
			8 Pengadaan Mebel Sekolah	Paket
			9 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket
			10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik
			11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket
			12 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik
			13 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang
			14 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang
			15 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan
			16 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan
			17 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang
			18 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	2	3	4	5
			19 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
			20 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital
			21 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang
			22 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
			23 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen
			24 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas
			25 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
			26 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
			27 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
			28 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			29 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
			30 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan
			31 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
		2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit
			2 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang
			3 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	2	3	4	5
			4 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
			5 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang
			6 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			7 Pengadaan Mebel Sekolah	Paket
			8 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket
			9 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik
			10 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket
			11 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik
			12 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang
			13 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang
			14 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan
			15 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan
			16 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang
			17 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
			18 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital
			19 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	2	3	4	5
			20 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
			21 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen
			22 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas
			23 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
			24 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan
			25 Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
			26 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
			27 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
		3 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit
			2 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit
			3 Rehabilitasi Sedang/ Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit
			4 Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket
			5 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket
			6 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta didik
			7 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang
			8 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada	Orang

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	2	3	4	5
			Satuan Pendidikan PAUD	
			9 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan
			10 Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan
			11 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang
			12 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang
			13 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
			14 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen
			15 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas
			16 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
			17 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit
			18 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
			19 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
		4 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Unit
			2 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Paket
			3 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang
			4 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan
			5 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	2	3	4	5
			6 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang
			7 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta didik
			8 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen
			2 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan

### 3.1.2. SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pencapaian Bidang Kesehatan sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pencapaian Bidang Kesehatan**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang
			2 Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang
			3 Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang
			4 Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang
			5 Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang
			6 Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang
			7 Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang
			8 Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang
			9 Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
			10 Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang
			11 Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang
			12 Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang

### 3.1.3. SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pencapaian Bidang Pekerjaan Umum sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pencapaian Bidang Pekerjaan Umum**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	2	3	4	5
1	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Ha

### 3.1.4. SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pencapaian Bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pencapaian Bidang Perumahan Rakyat**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	2	3	4	5
1	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 2. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah Unit Rumah

### 3.1.5. SPM Pelayanan Dasar Bidang Trantibumlinmas

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pencapaian Bidang Trantibumlinmas sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**pencapaian Bidang Trantibumlinmas**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan		
1	2	3	4	5		
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen		
			4 Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen		
			5 Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang		
			6 Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen		
			7 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum	Unit		
			8 Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Dokumen		
			9 Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada			
			10 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol Pngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Orang		
			11 Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen		
			12 Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Orang		
			13 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Orang		
			14 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang		
			15 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan		
			16 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan		
			17 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Laporan		
			18 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Unit		
			2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1 Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
					2 Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
		3 Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			Laporan	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan			
1	2	3	4	5			
			4	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan		
			5	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen		
			6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Unit		
			7	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan		
			8	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Laporan		
			9	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Dokumen		
			10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan		
			11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan		
			12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan		
			3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	2	Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen
			3		Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	
			4		Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	
5	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Laporan					
6	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Laporan					
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		3	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
4				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang		
			2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
					2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang
					3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
					4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit
					5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawasan
					6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan
					7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	
					8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang
					9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen
					10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang
			11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen		
			12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga		

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan		
1	2	3	4	5		
			13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan	
			14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	
			15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit	
			16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	
			17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	
		3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan
				2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
				3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang
				7	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
				8	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Orang
				9	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang
				10	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	Dokumen
				11	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan
		4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
				2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
				3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
				4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen
				5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan
				6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	
				7	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Orang
				8	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Orang
				9	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
				10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen
				11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usahadalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lembaga
				12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Laporan
				13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Dokumen

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan			
1	2	3	4	5			
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		
			2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Laporan		
			3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Dokumen		
			4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		
			5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen		
			7	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Orang		
			8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Desa/Kelurahan		
			11	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangann Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen		
			12	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Laporan		
			13	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen		
			14	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen		
			15	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen		
			16	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen		
			17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit		
			18	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dokumen		
			19	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Keluarga		
			2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen
					2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen
			3	Investigasi Kejadian Kebakaran	1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen
		4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	
				2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	desa	
				3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	
		5	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi	1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	
				2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi	Dokumen	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	2	3	4	5
		Membahayakan Manusia	membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	
			4 Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan
			5 Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit

### 3.1.6. SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pencapaian Bidang Sosial sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**  
**pencapaian Bidang Sosial**

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	
1	2	3	4	5	
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1 Penyediaan permakanan	Orang	
			2 Penyediaan sandang	Orang	
			3 Penyediaan alat bantu	Orang	
			4 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	
			5 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	
			6 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	
			7 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	
			8 Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	
			9 Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	
			10 Pemberian layanan kedaruratan	Orang	
			11 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	
			12 Pemberian layanan rujukan	Dokumen	
		2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1 Penyediaan makanan	Orang
				2 Penyediaan sandang	Orang
3 Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit				
4 Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang				
5 Pelayanan dukungan Psikososial	Orang				

### 3.2. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2025-2029

#### 3.2.1. Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan

**Tabel 3.8**  
**Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2025-2029**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)				Anggaran (Rp)	Pencapaian SPM (2026)				Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi				Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Orang	50.990	51.412	51.412			56.752.470.548	51.550	51.550			59.590.094.075		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi sekolah	%	65,09			100,00	100,00	21.073.115.968			100,00	100,00	22.126.771.766		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
2	Angka partisipasi murni	%				85,97	85,97	31.482.409.476			85,98	85,98	33.056.529.950		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
3	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	74,03			78,33	78,33	2.732.084.350			78,35	78,35	2.868.688.567		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
4	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	88,09			82,71	82,71	1.428.527.727			82,91	82,91	1.499.954.113		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
5	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	15,19			8,30	8,30	-			8,35	8,35	-		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
6	Kecukupan formasi guru ASN	%				23,09	23,09	-			23,10	23,10	-		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
7	Indeks distribusi guru	%	0,42			0,37	0,37	36.333.027			0,38	0,38	38.149.679		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
8	Proporsi PTK bersertifikat	%	47,79	-	-	62,10	62,10	-	-	-	62,11	62,11	-		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)				Anggaran (Rp)	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
9	Proporsi PTK penggerak*	%	0			1,80	1,80	-			1,82	1,82	-		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	
2	Pendidikan Dasar	Orang	325.177	325.807	325.807			640.581.093.653	326.020	326.020			672.610.148.335		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	
	SD	Orang	216.699	217.131	217.131			395.758.375.329	217.240	217.240			415.546.294.096		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	
1	Angka partisipasi kasar	%	95,14			100,00	100,00	240.449.361.570			100,00	100,00	252.471.829.648		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	
2	Angka partisipasi sekolah	%	99			100,00	100,00	83.005.889.416			100,00	100,00	87.156.183.887		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	
3	Kemampuan literasi	Skor	70,83			72,16	72,16	68.329.534.056			72,76	72,76	71.746.010.759		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	
4	Kemampuan numerasi	Skor	51,35			54,08	54,08				55,24	55,24				APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
5	Perbedaan skor literasi	Nilai	3,06			2,17	2,17				2,16	2,16				APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	2,79			1,99	1,99				1,98	1,98				APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
7	Indeks iklim keamanan	Nilai	74,53			81,89	81,89	2.405.502.761			82,02	82,02	2.525.777.899		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	
8	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	73,84			82,97	82,97				83,10	83,10				APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	56,84			65,16	65,16				65,29	65,29				APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)				Anggaran (Rp)	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
10	Kecukupan formasi guru ASN	%	38			23,10	23,10	-			23,11	23,11	-		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	
11	Indeks distribusi guru	%	0,37			0,35	0,35	36.333.027			0,36	0,36	38.149.679		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	
12	Proporsi PTK bersertifikat	%	92			40,00	40,00	1.426.596.161			40,02	40,02	1.497.925.969		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	
13	Proporsi PTK penggerak*	%	0			2,08	2,08	105.158.340			2,13	2,13	110.416.257		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	
	SMP	Orang	108.478	108.676	108.676			244.822.718.323	108.780	108.780			257.063.854.240		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	
1	Angka partisipasi kasar	%	102,76			100,00	100,00	62.662.923.723			100,00	100,00	65.796.069.909		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	
2	Angka partisipasi sekolah	%	97,64			100,00	100,00	142.144.434.441			100,00	100,00	149.251.656.164		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	
3	Kemampuan literasi	Nilai	79,85			83,21	83,21	36.994.180.204			83,36	83,36	38.843.889.214		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	
4	Kemampuan numerasi	Nilai	68,73			77,36	77,36				77,61	77,61				APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
5	Perbedaan skor literasi	Nilai	2,81			5,44	5,44				5,43	5,43				APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	0			2,99	2,99				2,98	2,98				APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
7	Indeks iklim keamanan	Nilai	74			80,92	80,92	2.159.611.839			81,09	81,09	2.267.592.431		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)				Anggaran (Rp)	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	74,96			80,77	80,77				80,96	80,96			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59,89			65,04	65,04				65,15	65,15			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
10	Kecukupan formasi guru ASN	%	50			5,10	5,10	-			6,05	6,05	-		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
11	Indeks distribusi guru	%	0,31			0,36	0,36	36.333.028			0,37	0,37	38.149.679		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
12	Proporsi PTK bersertifikat	%	92			46,54	46,54	725.065.089			46,64	46,64	761.318.343		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
13	Proporsi PTK penggerak*	%	0			0,78	0,78	100.170.000			0,80	0,80	105.178.500		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
3	Pendidikan Kesetaraan	Orang	7.655	7.693	7.693			27.896.823.067	7.700	7.700			29.291.664.220		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi kasar	%						-					-		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
2	Angka partisipasi sekolah	%	22,15			100,00	100,00	26.117.313.481			100,00	100,00	27.423.179.155		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
3	Kemampuan literasi	Nilai	60,25			65,16	65,16				65,25	65,25			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
4	Kemampuan numerasi	Nilai	49,59			54,73	54,73	1.498.571.586			54,75	54,75	1.573.500.165		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
5	Perbedaan skor literasi	Nilai	4,82			1,85	1,85				1,84	1,84			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)				Anggaran (Rp)	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai	3,13			1,27	1,27				1,26	1,26			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	
7	Indeks iklim keamanan	Nilai	68,02			69,35	69,35	280.938.000			69,46	69,46	294.984.900		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	
8	Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	63,76			62,74	62,74				62,75	62,75				APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	54,73			56,46	56,46				56,48	56,48				APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
10	Kecukupan formasi guru ASN	%						-					-		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	
11	Indeks distribusi guru	%						-					-		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	
12	Proporsi PTK bersertifikat	%						-					-		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	
13	Proporsi PTK penggerak*	%						-					-		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2027)					Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Pendidikan Anak Usia Dini	51.650	51.650			62.569.598.779	51.800	51.800			65.698.078.718		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi sekolah			100,00	100,00	23.233.110.354			100,00	100,00	24.394.765.872		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2027)					Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Angka partisipasi murni			85,99	85,99	34.709.356.447			86,00	86,00	36.444.824.270		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
3	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B			78,37	78,37	3.012.122.996			78,39	78,39	3.162.729.145		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
4	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)			83,11	83,11	1.574.951.819			83,31	83,31	1.653.699.410		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
5	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD			8,40	8,40	-			8,45	8,45	-		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
6	Kecukupan formasi guru ASN			23,11	23,11	-			23,12	23,12	-		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
7	Indeks distribusi guru			0,39	0,39	40.057.162			0,40	0,40	42.060.021		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
8	Proporsi PTK bersertifikat			62,12	62,12	-	-	-	62,13	62,13	-		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
9	Proporsi PTK penggerak*			1,84	1,84	-			1,86	1,86	-		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
2	Pendidikan Dasar	326.258	326.258			706.240.655.752	326.625	326.625			741.552.688.540		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
	SD	217.366	217.366			436.323.608.801	217.455	217.455			458.139.789.241		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi kasar			100,00	100,00	265.095.421.130			100,00	100,00	278.350.192.187		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
2	Angka partisipasi sekolah			100,00	100,00	91.513.993.081			100,00	100,00	96.089.692.735		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2027)					Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Kemampuan literasi			73,36	73,36	75.333.311.297			73,40	73,40	79.099.976.862		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
4	Kemampuan numerasi			56,40	56,40				57,56	57,56			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
5	Perbedaan skor literasi			2,14	2,14				2,12	2,12			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
6	Perbedaan skor numerasi			1,97	1,97				1,96	1,96			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
7	Indeks iklim keamanan			82,15	82,15	2.652.066.793			82,28	82,28	2.784.670.133		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
8	Indeks iklim kebhinekaan			83,23	83,23				83,36	83,36			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
9	Indeks iklim inklusivitas			65,42	65,42				65,55	65,55			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
10	Kecukupan formasi guru ASN			23,21	23,21	-			23,31	23,31	-		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
11	Indeks distribusi guru			0,37	0,37	40.057.162			0,38	0,38	42.060.021		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
12	Proporsi PTK bersertifikat			40,04	40,04	1.572.822.267			40,06	40,06	1.651.463.380		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
13	Proporsi PTK penggerak*			2,18	2,18	115.937.070			2,23	2,23	121.733.923		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
	SMP	108.892	108.892			269.917.046.952	109.170	109.170			283.412.899.299		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2027)					Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Angka partisipasi kasar			100,00	100,00	69.085.873.404			100,00	100,00	72.540.167.074		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
2	Angka partisipasi sekolah			100,00	100,00	156.714.238.972			100,00	100,00	164.549.950.920		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
3	Kemampuan literasi			83,51	83,51	40.786.083.675			83,66	83,66	42.825.387.858		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
4	Kemampuan numerasi			77,86	77,86				78,11	78,11			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
5	Perbedaan skor literasi			5,41	5,41				5,39	5,39			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
6	Perbedaan skor numerasi			2,97	2,97				2,95	2,95			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
7	Indeks iklim keamanan			81,26	81,26	2.380.972.052			81,43	81,43	2.500.020.655		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
8	Indeks iklim kebhinekaan			81,15	81,15				81,34	81,34			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
9	Indeks iklim inklusivitas			65,26	65,26				65,37	65,37			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
10	Kecukupan formasi guru ASN			7,15	7,15	-			8,10	8,10	-		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
11	Indeks distribusi guru			0,38	0,38	40.057.163			0,39	0,39	42.060.021		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
12	Proporsi PTK bersertifikat			46,74	46,74	799.384.261			46,84	46,84	839.353.474		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
13	Proporsi PTK penggerak*			0,82	0,82	110.437.425			0,84	0,84	115.959.296		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2027)					Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	Pendidikan Kesetaraan	7.755	7.755			30.756.247.431	7.775	7.775			32.294.059.803		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi kasar										-		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
2	Angka partisipasi sekolah			100,00	100,00	28.794.338.113			100,00	100,00	30.234.055.019		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
3	Kemampuan literasi			65,34	65,34	1.652.175.173			65,43	65,43	1.734.783.932		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
4	Kemampuan numerasi			54,77	54,77				54,79	54,79			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
5	Perbedaan skor literasi			1,82	1,82				1,81	1,81			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
6	Perbedaan skor numerasi			1,25	1,25				1,24	1,24			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
7	Indeks iklim keamanan			69,57	69,57	309.734.145			69,68	69,68	325.220.852		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
8	Indeks iklim kebhinekaan			62,76	62,76				62,77	62,77			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
9	Indeks iklim inklusivitas			56,49	56,49				56,50	56,50			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
10	Kecukupan formasi guru ASN					-					-		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
11	Indeks distribusi guru					-					-		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2027)					Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	Proporsi PTK bersertifikat					-					-		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
13	Proporsi PTK penggerak*					-					-		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendidikan Anak Usia Dini	51.920	51.920			68.982.982.653		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi sekolah			100,00	100,00	25.614.504.166		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
2	Angka partisipasi murni			86,01	86,01	38.267.065.483		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
3	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B			78,41	78,41	3.320.865.603		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
4	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)			83,35	83,35	1.736.384.380		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
5	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD			8,49	8,49	-		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
6	Kecukupan formasi guru ASN			23,13	23,13	-		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Indeks distribusi guru			0,41	0,41	44.163.022		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
8	Proporsi PTK bersertifikat	-	-	62,14	62,14	-		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
9	Proporsi PTK penggerak*			1,87	1,87	-		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
2	Pendidikan Dasar	326.825	326.825			778.630.322.967		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
	SD	217.555	217.555			481.046.778.703		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi kasar			100,00	100,00	292.267.701.796		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
2	Angka partisipasi sekolah			100,00	100,00	100.894.177.372		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
3	Kemampuan literasi			73,42	73,42	83.054.975.705		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
4	Kemampuan numerasi			57,59	57,59			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
5	Perbedaan skor literasi			2,11	2,11			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
6	Perbedaan skor numerasi			1,95	1,95			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
7	Indeks iklim keamanan			82,38	82,38	2.923.903.640		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Indeks iklim kebhinekaan			83,39	83,39			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
9	Indeks iklim inklusivitas			65,59	65,59			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
10	Kecukupan formasi guru ASN			23,39	23,39	-		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
11	Indeks distribusi guru			0,39	0,39	44.163.022		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
12	Proporsi PTK bersertifikat			40,07	40,07	1.734.036.549		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
13	Proporsi PTK penggerak*			2,26	2,26	127.820.620		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
	SMP	109.270	109.270			297.583.544.264		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi kasar			100,00	100,00	76.167.175.428		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
2	Angka partisipasi sekolah			100,00	100,00	172.777.448.466		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
3	Kemampuan literasi			83,66	83,66			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
4	Kemampuan numerasi			78,15	78,15	44.966.657.251		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
5	Perbedaan skor literasi			5,41	5,41			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Perbedaan skor numerasi			2,94	2,94			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
7	Indeks iklim keamanan			81,45	81,45	2.625.021.688		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
8	Indeks iklim kebhinnekaan			81,38	81,38			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
9	Indeks iklim inklusivitas			65,39	65,39			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
10	Kecukupan formasi guru ASN			8,11	8,11	-		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
11	Indeks distribusi guru			0,40	0,40	44.163.022		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
12	Proporsi PTK bersertifikat			46,94	46,94	881.321.147		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
13	Proporsi PTK penggerak*			0,85	0,85	121.757.261		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
3	Pendidikan Kesetaraan	7.795	7.795			33.908.762.793		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
1	Angka partisipasi kasar					-		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
2	Angka partisipasi sekolah			100,00	100,00	31.745.757.770		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
3	Kemampuan literasi			65,45	65,45	1.821.523.128		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	Kemampuan numerasi			54,81	54,81			APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	
5	Perbedaan skor literasi			1,80	1,80				APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
6	Perbedaan skor numerasi			1,23	1,23				APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
7	Indeks iklim keamanan			69,72	69,72	341.481.895		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	
8	Indeks iklim kebhinekaan			62,78	62,78				APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
9	Indeks iklim inklusivitas			56,51	56,51				APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
10	Kecukupan formasi guru ASN					-		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	
11	Indeks distribusi guru					-		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	
12	Proporsi PTK bersertifikat					-		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	
13	Proporsi PTK penggerak*					-		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	

### 3.2.2. Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan

**Tabel 3.9**  
**Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025-2029**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Nama Subkegiatan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Nama Subkegiatan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	<b>Pelayanan kesehatan ibu hamil</b>		37,944	37.591	36.851			2.984.056.000		APBD/ APBN	Dinkes	37.898				3.437.070.000		APBD/ APBN	Dinkes
a	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	30,418			37.766	37.304	18.883.000						4.737		4.737.350			
b	Tablet Tambah Darah	Tablet	2,737,620			3.398.940	3.357.360	714.229.000		APBN	Kemenkes			3.410.820		757.960.000			
c	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	30,418			37.766	37.304	944.150.000						37.898		1.136.940.000			
d	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Hb	Paket	30,418			37.766	37.304	8.750.000						37.898		10.500.000			
e	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	30,418			37.766	37.304	14.000.000						37.898		15.750.000			
f	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	30,418			37.766	37.304	56.649.000						37.898		75.796.000			
g	Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu	Paket	30,418			37.766	37.304	283.245.000						37.898		303.184.000			
h	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (Kia)	Buku	30,418			37.766	37.304	944.150.000						37.898		1.136.940.000			
i	Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Spesialis Kebidanan	Orang	213			300	286							1.887					
j	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	355			497	502							2.129					
k	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	340			514	1.077							3.231					
2	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</b>		35,024	37.591	34.869			1.090.139.000		APBD/ APBN	Dinkes	33.474				200.844.000		APBD/ APBN	Dinkes
a	Formulir Partograf	Formulir	29,035			37.591	37.591	75.182.000						33.474		66.948.000			

b	Kartu Ibu (Rekam Medis)	Paket	29,035			37.591	37.591	75.182.000					33.474		66.948.000			
c	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	Buku	29,035			37.591	37.591	939.775.000					33.474		66.948.000			
d	Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Spesialis Kebidanan Dan Kandungan	Orang	213			1.887	312						286					
e	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	355			2.129	505						492					
f	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	340			3.231	1.096						1.077					
<b>3</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>		34,349	<b>35.967</b>	<b>34.190</b>			<b>2.891.433.510</b>		<b>APBD/ APBN</b>	<b>Dinkes</b>	<b>32.891</b>			<b>4.210.048.000</b>		<b>APBD/ APBN</b>	<b>Dinkes</b>
a	Vaksin Hepatitis BO	Vaksin	27,652			23.978	23.952	688.048.710					32.891		1.151.185.000			
b	Vitamin K1 Injeksi	Ampul	13,826			35.967	3.419	392.040.300					32.891		986.730.000			
c	Salep/Tetes Mata Antibiotik	Orang	2,765			35.967	3.419	899.175.000					32.891		986.730.000			
d	Formulir Bayi Baru Lahir	Formulir	27,652			35.967	35.967	8.991.750					32.891		65.782.000			
e	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (Mtbm)	Formulir	27,652			16.011	21.415	4.002.750					98.673		197.346.000			
f	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	Buku	27,652			35.967	35.967	899.175.000					32.891		822.275.000			
g	Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	213			300	295						295					
h	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	355			497	502						492					
i	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	340			514	1.077						1					
<b>4</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Balita</b>		130,036	<b>141.819</b>	<b>141.702</b>			<b>58.437.563.123</b>		<b>APBD/ APBN</b>	<b>Dinkes</b>	<b>70.720</b>			<b>11.912.880.000</b>		<b>APBD/ APBN</b>	<b>Dinkes</b>
a	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) Atau Instrumen Standar Lain Yang Berlaku	Dokumen	135,756			141.819	141.702	106.364.250					70.720		3.182.400.000			
b	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	135,756			141.819	141.702	106.364.250					70.720		212.160.000			
c	Buku Kartu Ibu Dan Anak (KIA)	Buku	135,756			141.702	141.702	2.616.625.000					70.720		3.041.910.000			
d	Vitamin A Biru	Kapsul	135,756			16.054	15.170	140.970.174					15.168		7.584.000			
e	Vitamin A Merah	Kapsul	135,756			84.273	82.571	836.072.433					82.571		41.285.500			

f	Vaksin Imunisasi Dasar: HBO	Vaksin	135,756			135.301		40.590.300					136.277		68.138.500			
g	Vaksin Imunisasi Dasar: BCG	Vaksin	33,939			23.978	31.099	580.507.380					32.891		65.782.000			
h	Vaksin Imunisasi Dasar: Polio	Vaksin	1,874			95.912	118.896	2.322.029.520					32.891		164.455.000			
i	Vaksin Imunisasi Dasar: IPV	Vaksin	33,939			47.956	53.732	8.248.432.000					32.891		1.644.550.000			
j	Vaksin Imunisasi Dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	33,939			71.934	83.448	15.106.140.000					32.981		989.430.000			
k	Vaksin Imunisasi Dasar: Campak	Vaksin	33,939			23.978	29.532	4.061.201.816					32.891		1.973.460.000			
l	Vaksin Imunisasi Dasar: Rubella	Vaksin	33,939			33.825		-							-			
m	Vaksin Imunisasi Lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	33,939			15.000	22.038	3.150.000.000					32.891		986.730.000			
n	Vaksin Imunisasi Lanjutan : Campak	Vaksin	33,939			15.000	21.881	2.540.790.000					32.891		1.973.460.000			
o	Vaksin Imunisasi Lanjutan : Rubella	Vaksin	33,939			15.000		-							-			
p	Jarum Suntik Dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	13,472			384.140	293.758	19.168.586.000					200.695		602.085.000			
q	Peralatan Anafilaktik	Paket	13,472			135.301	80	2.029.515.000					80		1.360.000			
r	Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang	213			300	304						304					
s	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	355			497	502						492					
t	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	340			514	1						1.077					
u	Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	Orang	74			135	272						107					
v	Tenaga Kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	9995			5.031	5.031						10.005					
w	Tenaga Non Kesehatan : Guru PAUD	Orang	2856			5.112	5.112						4.495					
																		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
5	<b>Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar</b>								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	APBD	Dinkes	328.283			11.283.196.350		APBD/ APBN	Dinkes
a	Buku Raport Kesehatanku	Buku	112,03			294,794							328.283		9.848.490.000			

b	Buku Pemantauan Kesehatan	Buku	112,03			48.683	48.683	1.460.490.000					53.551		803.269.500			
c	Kuesioner Skrining Kesehatan	Dokumen	112,03			381.769	381.846	668.095.750					419.946		629.918.850			
d	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dan Remaja Di Dalam Sekolah	Dokumen	112,03			868	868	1.302.000					955		1.432.200			
e	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dan Remaja Di Luar Sekolah	Formulir	112,03			52	52	78.000					57		85.800			
f	Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Gigi	Orang	213		222	300	304						1.232					
g	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	355			497	502						2.129					
h	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	340			514	1.077						3.231					
i	Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	Orang	74			135	272						3.231					
j	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang	140			188	240						3.231					
k	Tenaga Kesehatan : Kader Kesehatan	Orang	9995			5.031	5.031						32.828					
l	Tenaga Non Kesehatan : Guru	Orang	14246			868	868						60					
<b>6</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</b>		1,333,143		<b>736.411</b>	<b>736.411</b>		<b>331.314.219.750</b>		APBD/ APBN	Dinkes	<b>736.411</b>			<b>4.228.406.670</b>		APBD/ APBN	Dinkes
a	Pedoman Dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	104			160	160	24.000.000		APBD/ APBN	Dinkes		160		793.000.000		APBD/ APBN	Dinkes
b	Alat Ukur Berat Badan	Unit	104			231	231	215.384.400		APBD/ APBN	Dinkes		231		207.900.000		APBD/ APBN	Dinkes
c	Alat : Alat Ukur Tinggi Badan	Unit	104			231	231	12.705.000		APBD/ APBN	Dinkes		231		24.255.000		APBD/ APBN	Dinkes
d	Alat : Alat Ukur Lingkar Perut	Unit	104			231	231	24.370.500		APBD/ APBN	Dinkes		231		12.705.000		APBD/ APBN	Dinkes
e	Alat : Tensimeter	Unit	104			231	231	310.833.600		APBD/ APBN	Dinkes		231		310.695.000		APBD/ APBN	Dinkes
f	Alat : Glukometer	Unit	104			462	462	91.707.000		APBD/ APBN	Dinkes		231		69.300.000		APBD/ APBN	Dinkes
g	Alat : Tes Strip Gula Darah	Unit	28,372			1.677.231		276.743.115.000		APBD/ APBN	Dinkes		736.411		2.466.976.850		APBD/ APBN	Dinkes
h	Alat : Lancet	Unit	7,093			1.677.231		32.706.004.500		APBD/ APBN	Dinkes		736.411		143.600.145		APBD/ APBN	Dinkes
i	Alat : Kapas Alkohol	Unit	14,186			1.677.231		20.546.079.750		APBD/ APBN	Dinkes		736.411		92.051.375		APBD/ APBN	Dinkes



<b>8</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>		227,676	<b>231.130</b>	<b>231.130</b>			<b>104.893.900</b>	-	APBD/ APBN	Dinkes	<b>231.130</b>				-	-	APBD/ APBN	Dinkes
a	Pedoman Pengendalian Hipertensi Dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	104			<b>160</b>	<b>160</b>	<b>24.000.000</b>		APBD/ APBN	Dinkes		<b>160</b>	<b>160</b>	<b>400.000.000</b>			APBD/ APBN	Dinkes
b	Obat Hipertensi	Paket	104			106.000	106.000	<b>7.208.000</b>		APBD/ APBN	Dinkes		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>613.200</b>			APBD/ APBN	Dinkes
c	Tensimeter	Unit	2,837			231	231	<b>73.665.900</b>		APBD/ APBN	Dinkes		<b>160</b>	<b>160</b>	<b>215.200.000</b>			APBD/ APBN	Dinkes
d	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	35			<b>80</b>	<b>80</b>	<b>20.000</b>		APBD/ APBN	Dinkes		<b>198.980</b>	<b>51.047</b>	<b>59.694.000</b>			APBD/ APBN	Dinkes
e	Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang	213			<b>300</b>	<b>304</b>	-					<b>304</b>	<b>314</b>					
f	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	355			<b>497</b>	<b>502</b>	-					<b>492</b>	<b>493</b>					
g	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	340			<b>514</b>	<b>1.077</b>	-					<b>1.077</b>	<b>1.080</b>					
h	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	140			<b>188</b>	<b>240</b>						<b>157</b>	<b>158</b>					
<b>9</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</b>		41,413	<b>42.042</b>	<b>42.042</b>			<b>71.497.473.850</b>	-	APBD/ APBN	Dinkes	<b>42.042</b>			<b>71.497.473.850</b>	-		APBD/ APBN	Dinkes
a	Obat Diabetes Melitus	Paket	104			<b>42.042</b>	<b>42.042</b>	<b>13.810.797.000</b>		APBD/ APBN	Dinkes		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>985.500</b>			APBD/ APBN	Dinkes
b	Alat : Glukometer	Unit	28,372			160	160	<b>26.400.000</b>		APBD/ APBN	Dinkes		<b>80</b>	<b>80</b>	<b>23.600.000</b>			APBD/ APBN	Dinkes
c	Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit	14,186			<b>504.504</b>	<b>504.504</b>	<b>83.243.160.000</b>		APBD/ APBN	Dinkes		<b>44.218</b>	<b>15.290</b>	<b>148.130.300</b>			APBD/ APBN	Dinkes
d	Alat : Kapas Alkohol	Unit	7,093			<b>504.504</b>	<b>504.504</b>	<b>6.180.174.000</b>		APBD/ APBN	Dinkes		<b>44.218</b>	<b>15.290</b>	<b>5.527.250</b>			APBD/ APBN	Dinkes
e	Alat : Lancet	Unit	2,837			<b>504.504</b>	<b>504.504</b>	<b>9.837.828.000</b>		APBD/ APBN	Dinkes		<b>44.218</b>	<b>15.290</b>	<b>8.622.510</b>			APBD/ APBN	Dinkes
f	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (Siptm)	Orang	104			<b>80</b>	<b>80</b>	<b>20.000</b>		APBD/ APBN	Dinkes		<b>44.218</b>	<b>15.290</b>	<b>13.265.400</b>			APBD/ APBN	Dinkes
g	Pedoman Dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (Kie)	Pedoman	35			<b>160</b>	<b>160</b>	<b>24.000.000</b>					<b>240</b>	<b>240</b>	<b>600.000.000</b>			APBD/ APBN	Dinkes
h	Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang	213			<b>300</b>	<b>304</b>	-					<b>304</b>	<b>314</b>					
i	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	355			<b>497</b>	<b>502</b>	-					<b>492</b>	<b>493</b>					
j	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	340			<b>514</b>	<b>1.077</b>	-					<b>1.077</b>	<b>1.080</b>					

k	Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	Orang	74			135	272	-						107	108	-			
l	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	140			188	240							157	158				
10	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat</b>		3,563			3.597	3.597	29.900.000	ODGJ Berat	APBD/ APBN	Dinkes	3.597	3.597				ODGJ Berat	APBD/ APBN	Dinkes
a	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) Atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa Terbaru (Bila Sudah Tersedia)	Buku	20			80	80	9.600.000		APBD/ APBN	Dinkes			80	80	16.000.000		APBD/ APBN	Dinkes
b	Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	Paket	90			80	80	280.000		APBD/ APBN	Dinkes			92		184.000.000		APBD/ APBN	Dinkes
c	Penyediaan Formulir Pencatatan Dan Pelaporan	Orang	20			80	80	20.000		APBD/ APBN	Dinkes			502.512	502.512	150.753.600		APBD/ APBN	Dinkes
d	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	20			80	80	20.000.000		APBD/ APBN	Dinkes			80	80	20.000.000		APBD/ APBN	Dinkes
e	Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang	213			300	304							304	314	6.737.500			
f	Tenaga Kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang	4			80	80							80	32	660.000			
g	Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang	963			13	13							80	28	6.737.500			
11	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</b>		29454			53.615	53.615	48.067.515.650		APBD/ APBN	Dinkes	55.513	55.513			2.711.545.000		APBD/ APBN	DINKES
a	Media Kie (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media	35			53.613	53.615	23.370.778.500		APBD/ APBN	Dinkes			80	80	31.000.000		APBD/ APBN	DINKES
b	Reagen Zn Tb	Paket	525			10.012	10.012	903.082.400		APBD/ APBN	Dinkes			1.000	101	27.169.000		APBD/ APBN	DINKES
c	Masker Jenis Rumah Tangga Dan Masker N95	Paket	38304			53.613	55.240	4.982.648.000		APBD/ APBN	Dinkes			15.324	1.120	14.560.000		APBD/ APBN	DINKES
d	Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengereng	Paket	37327			167.301	167.301	501.903.000		APBD/ APBN	Dinkes			411.192	29.850	98.505.000		APBD/ APBN	DINKES

e	Catridge Tes Cepat Molekuler	Paket	21168			53.613	53.613	13.531.921.200		APBD/ APBN	Dinkes			55.513	13.250	2.532.711.000		APBD/ APBN	DINKES
f	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan	Dokumen	35			53.613	53.613	4.763.515.050		APBD/ APBN	Dinkes			80	80	1.352.000		APBD/ APBN	DINKES
g	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (Sop)	Dokumen	35			175	175	13.667.500		APBD/ APBN	Dinkes			80	80	6.248.000		APBD/ APBN	DINKES
h	Dokter/ Dokter Spesialis Penyakit Dalam/ Dokter Spesialis Paru	Orang	213			300	283							281	282	-			
i	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	340			514	1.077							1.077	1.080	-			
j	Tenaga Kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (Atlm)	Orang	83			138	149							149	149	-			
k	Tenaga Kesehatan : Penata Rontgen	Orang				6	29							29	29	-			
l	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	140			188	240							157	158	-			
m	Tenaga Non Kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi Tertentu	Orang	614											10.005	13.355	-			
12	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)</b>		38,757	41.454	41.454			18.069.798.600	-	APBD/ APBN	Dinkes	43.431	43.431			25.880.168.742		APBD/ APBN	Dinkes
a	Media Kie (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	35			41.454	41.454	18.069.798.600		APBD/ APBN	Dinkes			56.642	13.485	24.690.247.800		APBD/ APBN	Dinkes
b	Tes Cepat Hiv (Rdt) Pertama	Paket	33,472			41.454	41.454			APBD/ APBN	Dinkes			56.642	20.625	1.189.482.000		APBD/ APBN	Dinkes
c	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit Yang Sesuai/Vacutainer Dan Jarum Sesuai	Paket	33,472			41.454	41.454			APBD/ APBN	Dinkes			56.642	20.625	71.942		APBD/ APBN	Dinkes
d	Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Spesialis Penyakit Dalam/Dokter Spesialis Kulit Dan Kelamin	Paket	35			300	367			APBD/ APBN	Dinkes			367	371	367.000		APBD/ APBN	Dinkes

e		Orang				40	314	-					40					
f	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang	364			514	1.077	-					1.077	1.080	-			
g	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang	340			497	502	-					492	493	-			
h	Tenaga Kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (Atlm)	Orang	83			138	149	-					149	149	-			
i	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	140			188	240	-					157	158	-			
j	Tenaga Non Kesehatan Terlatih Atau Mempunyai Kualifikasi Tertentu	Orang	151			180	158	-					158	-	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2026)					Nama Subkegiatan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Nama Subkegiatan	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil		37.974				3.424.182.400		APBD/APBN	Dinkes	38.050				4.886.317.308		APBD/APBN	Dinkes
a	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul			30.421		45.631.500						4.756		9.512.636			
b	Tablet Tambah Darah	Tablet			5.475.780		949.344.900						3.424.477		1.141.492.308			
c	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket			30.421		1.064.735.000						38.050		1.522.000.000			
d	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Hb	Paket			30.421		12.250.000						38.050		14.000.000			
e	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket			30.421		17.500.000						38.050		1.925.000			
f	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket			4.563		11.407.500						38.050		114.150.000			
g	Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu	Paket			30.421		304.210.000						38.050		570.750.000			
h	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (Kia)	Buku			30.421		1.064.735.000						38.050		1.522.000.000			
i	Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Spesialis Kebidanan	Orang			1.077								1.887					
j	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			392								2.129					
k	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.077								3.231					

<b>2</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</b>		<b>33.541</b>			<b>83.685.000</b>		<b>APBD/APBN</b>	<b>Dinkes</b>	<b>33.608</b>			<b>340.857.000</b>		<b>APBD/APBN</b>	<b>Dinkes</b>
a	Formulir Partograf	Formulir			<b>33.474</b>	<b>83.685.000</b>						<b>37.873</b>	<b>113.619.000</b>			
b	Kartu Ibu (Rekam Medis)	Paket			<b>33.474</b>	<b>83.685.000</b>						<b>37.873</b>	<b>113.619.000</b>			
c	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	Buku			<b>33.474</b>	<b>83.685.000</b>						<b>37.873</b>	<b>113.619.000</b>			
d	Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Spesialis Kebidanan Dan Kandungan	Orang			<b>286</b>							<b>1.887</b>				
e	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			<b>492</b>							<b>2.129</b>				
f	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			<b>1.077</b>							<b>3.231</b>				
<b>3</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>		<b>32.957</b>			<b>4.769.195.000</b>		<b>APBD</b>	<b>Dinkes</b>	<b>33.023</b>			<b>3.456.041.694</b>		<b>APBD</b>	<b>Dinkes</b>
a	Vaksin Hepatitis B0	Vaksin			<b>32.891</b>	<b>1.315.640.000</b>						<b>36.238</b>	<b>1.630.710.000</b>			
b	Vitamin K1 Injeksi	Ampul			<b>32.891</b>	<b>1.151.185.000</b>						<b>16.511</b>	<b>660.453.911</b>			
c	Salep/Tetes Mata Antibiotik	Orang			<b>32.891</b>	<b>1.151.185.000</b>						<b>3.302</b>	<b>132.094.782</b>			
d	Formulir Bayi Baru Lahir	Formulir			<b>32.891</b>	<b>82.227.500</b>						<b>36.238</b>	<b>108.714.000</b>			
e	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (Mtbm)	Formulir			<b>98.673</b>	<b>246.682.500</b>						<b>36.238</b>	<b>18.119.000</b>			
f	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	Buku			<b>32.891</b>	<b>822.275.000</b>						<b>36.238</b>	<b>905.950.000</b>			
g	Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang			<b>295</b>							<b>1.856</b>				
h	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			<b>492</b>							<b>2.129</b>				
i	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			<b>1.077</b>							<b>3.231</b>				
<b>4</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Balita</b>		<b>74.256</b>			<b>13.471.726.000</b>		<b>APBD</b>	<b>Dinkes</b>	<b>77.969</b>			<b>21.705.145.700</b>		<b>APBD</b>	<b>Dinkes</b>
a	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) Atau Instrumen Standar Lain Yang Berlaku	Dokumen			<b>70.720</b>	<b>3.536.000.000</b>						<b>77.969</b>	<b>4.288.284.000</b>			
b	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir			<b>70.720</b>	<b>247.520.000</b>						<b>77.969</b>	<b>311.875.200</b>			
c	Buku Kartu Ibu Dan Anak (KIA)	Buku			<b>15.168</b>	<b>4.057.760.000</b>						<b>77.969</b>	<b>701.200.000</b>			
d	Vitamin A Biru	Kapsul			<b>82.571</b>	<b>82.571.000</b>						<b>86.700</b>	<b>130.049.325</b>			

e	Vitamin A Merah	Kapsul			136.277		136.277.000					143.091		214.636.275			
f	Vaksin Imunisasi Dasar: HBO	Vaksin			32.891		32.891.000					164.894		247.341.000			
g	Vaksin Imunisasi Dasar: BCG	Vaksin			32.891		82.227.500					19.492		58.476.900			
h	Vaksin Imunisasi Dasar: Polio	Vaksin			32.891		263.128.000					12.995		129.949.000			
i	Vaksin Imunisasi Dasar: IPV	Vaksin			32.891		1.809.005.000					41.224		2.473.416.000			
j	Vaksin Imunisasi Dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin			32.891		1.151.185.000					41.224		1.648.944.000			
k	Vaksin Imunisasi Dasar: Campak	Vaksin			32.891		2.137.915.000					41.224		2.885.652.000			
l	Vaksin Imunisasi Dasar: Rubella	Vaksin					-							-			
m	Vaksin Imunisasi Lanjutan : DPT -HB - Hib	Vaksin			32.891		1.151.185.000					41.224		1.648.944.000			
n	Vaksin Imunisasi Lanjutan : Campak	Vaksin			32.891		2.137.915.000					41.224		2.885.652.000			
o	Vaksin Imunisasi Lanjutan : Rubella	Vaksin					-							-			
p	Jarum Suntik Dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit			200.659		702.306.500					164.894		659.576.000			
q	Peralatan Anafilaktik	Paket			80		1.600.000					164.894		4.122.350.000			
r	Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang			304							822					
s	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			492							2.129					
t	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.077							3.231					
u	Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	Orang			107							3.231					
v	Tenaga Kesehatan : Kader Kesehatan	Orang			10.005							3.290					
w	Tenaga Non Kesehatan : Guru PAUD	Orang			4.495							4.495					
<b>5</b>	<b>Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar</b>				<b>361.111</b>				<b>APBD</b>	<b>Dinkes</b>	<b>397.222</b>			<b>18.583.732.200</b>		<b>APBD</b>	<b>Dinkes</b>
a	Buku Raport Kesehatanku	Buku			328.527		11.498.445.000					397.222		15.888.897.200		APBD	Dinkes
b	Buku Pemantauan Kesehatan	Buku			53.551		1.071.020.000					58.906		1.472.652.500		APBD	Dinkes
c	Kuesioner Skrining Kesehatan	Dokumen			419.946		839.892.000					461.941		1.154.851.500		APBD	Dinkes
d	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dan Remaja Di Dalam Sekolah	Dokumen			24.427		48.854.000					26.870		67.174.250		APBD	Dinkes

e	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dan Remaja Di Luar Sekolah	Formulir			57		114.000					63		156.750		APBD	Dinkes
f	Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Gigi	Orang			304							1.232					
g	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			492							2.129					
h	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			286							3.231					
i	Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	Orang			107							3.231					
j	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang			157							3.231					
k	Tenaga Kesehatan : Kader Kesehatan	Orang			32.853							39.722					
l	Tenaga Non Kesehatan : Guru	Orang			60							120					
6	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</b>		736.411				4.036.351.670		APBD/ APBN	Dinkes	736.411			4.228.406.670		APBD/APBN	Dinkes
a	Pedoman Dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman			400		793.000.000		APBD/ APBN	Dinkes		160		793.000.000		APBD/APBN	Dinkes
b	Alat Ukur Berat Badan	Unit			160		144.000.000		APBD/ APBN	Dinkes		231		207.900.000		APBD/APBN	Dinkes
c	Alat : Alat Ukur Tinggi Badan	Unit			160		16.800.000		APBD/ APBN	Dinkes		231		24.255.000		APBD/APBN	Dinkes
d	Alat : Alat Ukur Lingkar Perut	Unit			160		8.800.000		APBD/ APBN	Dinkes		231		12.705.000		APBD/APBN	Dinkes
e	Alat : Tensimeter	Unit			160		215.200.000		APBD/ APBN	Dinkes		231		310.695.000		APBD/APBN	Dinkes
f	Alat : Glukometer	Unit			160		48.000.000		APBD/ APBN	Dinkes		231		69.300.000		APBD/APBN	Dinkes
g	Alat : Tes Strip Gula Darah	Unit			736.411		2.466.976.850		APBD/ APBN	Dinkes		736.411		2.466.976.850		APBD/APBN	Dinkes
h	Alat : Lancet	Unit			736.411		143.600.145		APBD/ APBN	Dinkes		736.411		143.600.145		APBD/APBN	Dinkes
i	Alat : Kapas Alkohol	Unit			736.411		92.051.375		APBD/ APBN	Dinkes		736.411		92.051.375		APBD/APBN	Dinkes
j	Alat : KIT IVA Tes	Unit			80		680.000.000		APBD/ APBN	Dinkes		80		680.000.000		APBD/APBN	Dinkes
k	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen			736.411		220.923.300		APBD/ APBN	Dinkes		736.411		220.923.300		APBD/APBN	Dinkes
l	Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang			304							38					
m	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			492							190					
n	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.077							148					
o	Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	Orang			207							38					

p	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			157							38					
q	Tenaga Non Kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi Tertentu	Orang			5.003							5.462					
7	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</b>		223.131			6.919.096.000		APBD	Dinkes	238.000		238.000		9.405.725.000		APBD	Dinkes
a	Strip Uji Pemeriksaan Gula Darah, Kolesterol	Paket	223.131		203.369	813.476.000				238.000		238.000		1.071.000.000			
b	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) Dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) Dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G).	Paket	223.131		203.369	4.550.000				238.000		238.000		4.725.000			
c	Buku Kesehatan Lansia	Buku			203.369	6.101.070.000						238.000		8.330.000.000			
d	Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang			304							822					
e	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			492							2.129					
f	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.077							3.231					
g	Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	Orang			107							3.231					
h	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			157							787					
i	Tenaga Non Kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi Tertentu	Orang			5.003							2.380					
8	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>		231.130			-	-	APBD/ APBN	Dinkes	231.130				-	-	APBD/APBN	Dinkes
a	Pedoman Pengendalian Hipertensi Dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman			3	7.500.000		APBD/ APBN	Dinkes			160		400.000.000		APBD/APBN	Dinkes
b	Obat Hipertensi	Paket			3	613.200		APBD/ APBN	Dinkes			231.130		47.242.972.000		APBD/APBN	Dinkes
c	Tensimeter	Unit			160	215.200.000		APBD/ APBN	Dinkes			160		215.200.000		APBD/APBN	Dinkes
d	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen			198.980	59.694.000		APBD/ APBN	Dinkes			231.130		69.339.000		APBD/APBN	Dinkes

e	Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang			80								175					
f	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			1.077								140					
g	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			107								35					
h	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang																
<b>9</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</b>		<b>42.042</b>				<b>71.497.473.850</b>	<b>-</b>	<b>APBD/APBN</b>	<b>Dinkes</b>	<b>42.042</b>			<b>71.497.473.850</b>	<b>-</b>	<b>APBD/APBN</b>	<b>Dinkes</b>	
a	Obat Diabetes Melitus	Paket			3		985.500		APBD/APBN	Dinkes			42.042		13.810.797.000		APBD/APBN	Dinkes
b	Alat : Glukometer	Unit			80		23.600.000		APBD/APBN	Dinkes			80		23.600.000		APBD/APBN	Dinkes
c	Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit			44.218		148.130.300		APBD/APBN	Dinkes			42.042		140.840.700		APBD/APBN	Dinkes
d	Alat : Kapas Alkohol	Unit			44.218		5.527.250		APBD/APBN	Dinkes			42.042		5.255.250		APBD/APBN	Dinkes
e	Alat : Lancet	Unit			44.218		8.622.510		APBD/APBN	Dinkes			42.042		8.198.190		APBD/APBN	Dinkes
f	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (Siptm)	Orang			44.218		13.265.400		APBD/APBN	Dinkes			42.042		12.612.600		APBD/APBN	Dinkes
g	Pedoman Dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (Kie)	Pedoman			240		600.000.000		APBD/APBN	Dinkes			160		400.000.000		APBD/APBN	Dinkes
h	Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang			304		-						175		-			
i	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			492		-						140		-			
j	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.077		-						35		-			
k	Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	Orang			107		-						35		-			
l	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			157													
<b>10</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat</b>		<b>3.597</b>	<b>3.597</b>				<b>ODGJ Berat</b>	<b>APBD/APBN</b>	<b>Dinkes</b>	<b>3.597</b>	<b>3.597</b>				<b>ODGJ Berat</b>	<b>APBD/APBN</b>	<b>Dinkes</b>
a	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) Atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa Terbaru (Bila Sudah Tersedia)	Buku			80		16.000.000		APBD/APBN	Dinkes			80		16.000.000		APBD/APBN	Dinkes

b	Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	Paket				-		APBD/APBN	Dinkes			92		184.000.000		APBD/APBN	Dinkes
c	Penyediaan Formulir Pencatatan Dan Pelaporan	Orang			3.612		1.083.600	APBD/APBN	Dinkes			3.597		1.079.100		APBD/APBN	Dinkes
d	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media			80		20.000.000	APBD/APBN	Dinkes			80		20.000.000		APBD/APBN	Dinkes
e	Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang			304		7.411.250					21		8.152.375			
f	Tenaga Kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang			80		726.000					6		798.600			
g	Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang			80		7.411.250					21		8.152.375			
11	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</b>		47.783	47.783			12.475.178.524	APBD/APBN	DINKES	42.272	42.272			9.929.345.456		APBD/APBN	DINKES
a	Media Kie (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media			80	80	31.000.000	APBD/APBN	DINKES			80	80	31.000.000		APBD/APBN	DINKES
b	Reagen Zn Tb	Paket			1.000	1.000	269.000.000	APBD/APBN	DINKES			1.000	1.000	269.000.000		APBD/APBN	DINKES
c	Masker Jenis Rumah Tangga Dan Masker N95	Paket			15.342	15.342	199.446.000	APBD/APBN	DINKES			12.598	12.598	163.774.000		APBD/APBN	DINKES
d	Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering	Paket			411.192	411.192	1.356.933.600	APBD/APBN	DINKES			417.504	417.504	1.377.763.200		APBD/APBN	DINKES
e	Catridge Tes Cepat Molekuler	Paket			55.513	55.513	10.611.198.924	APBD/APBN	DINKES			42.272	42.272	8.080.208.256		APBD/APBN	DINKES
f	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan	Dokumen			80	80	1.352.000	APBD/APBN	DINKES			80	80	1.352.000		APBD/APBN	DINKES
g	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (Sop)	Dokumen			80	80	6.248.000	APBD/APBN	DINKES			80	80	6.248.000		APBD/APBN	DINKES
h	Dokter/ Dokter Spesialis Penyakit Dalam/ Dokter Spesialis Paru	Orang			281		-					151		-			
i	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.077		-					2.899		-			
j	Tenaga Kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (Atlm)	Orang			149		-					363		-			
k	Tenaga Kesehatan : Penata Rontgen	Orang			29		-					3		-			
l	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			4		-					4		-			
m	Tenaga Non Kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi Tertentu	Orang			1.005		-					35		-			

12	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)</b>		45.415	45.415			25.936.489.532		APBD	Dinkes	47.716	47.716			25.126.600.033		APBD	Dinkes
a	Media Kie (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media			56.642	56.642	24.690.291.390						54.873	54.873	23.919.315.060			
b	Tes Cepat Hiv (Rdt) Pertama	Paket			56.642	56.642	1.189.484.100						54.873	54.873	1.152.341.400			
c	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit Yang Sesuai/Vacutainer Dan Jarum Sesuai	Paket			56.642	56.642	71.942						54.873	54.873	70.173			
d	Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Spesialis Penyakit Dalam/Dokter Spesialis Kulit Dan Kelamin	Paket			56.642	56.642	56.642.100						54.873	54.873	54.873.400			
e		Orang			367	40	-						40	40	-			
f	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			1.077	40	-						40	40	-			
g	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			492	40	-						40	40	-			
h	Tenaga Kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (Atlm)	Orang			1.077	35	-						35	35	-			
i	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			157	35	-						35	35	-			
j	Tenaga Non Kesehatan Terlatih Atau Mempunyai Kualifikasi Tertentu	Orang			158	35	-						35	35	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2028)					Pencapaian SPM (2029)				
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran
1	2	3	37	38	39	40	41	37	38	39	40	41
1	<b>Pelayanan kesehatan ibu hamil</b>		<b>38.126</b>				<b>6.991.053.292</b>	<b>38.202</b>				<b>8.888.066.843</b>
a	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul			<b>38.126</b>		<b>76.252.000</b>			<b>38.202</b>		<b>76.404.000</b>

b	Tablet Tambah Darah	Tablet			3.431.326		1.143.775.292			3.438.189		1.146.062.843
c	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket			38.126		1.525.040.000			38.202		1.528.080.000
d	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Hb	Paket			38.126		14.000.000			38.202		1.528.080.000
e	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket			38.126		2.096.930.000			38.202		1.528.080.000
f	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket			38.126		114.378.000			38.202		1.528.080.000
g	Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu	Paket			38.126		571.890.000			38.802		77.604.000
h	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (Kia)	Buku			38.126		1.525.040.000			38.802		1.552.080.000
i	Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Spesialis Kebidanan	Orang			1.887							-
j	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			2.129							
k	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			3.231							
<b>2</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</b>				<b>33.675</b>		<b>1.176.419.000</b>	<b>33.743</b>				<b>1.749.150.000</b>
a	Formulir Partograf	Formulir			37.949		113.847.000			38.025		114.075.000
b	Kartu Ibu (Rekam Medis)	Paket			37.949		113.847.000			38.025		114.075.000
c	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	Buku			37.949		948.725.000			38.025		1.521.000.000
d	Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Spesialis Kebidanan Dan Kandungan	Orang			1.887							
e	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			2.129							
f	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			3.231							
<b>3</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>				<b>33.089</b>		<b>3.462.918.783</b>	<b>33.155</b>				<b>4.015.617.542</b>
a	Vaksin Hepatitis B0	Vaksin			36.310		1.633.950.000			36.383		1.637.235.000
b	Vitamin K1 Injeksi	Ampul			16.544		661.774.819			16.577		663.098.369
c	Salep/Tetes Mata Antibiotik	Orang			3.309		132.358.964			3.316		132.623.674
d	Formulir Bayi Baru Lahir	Formulir			36.310		108.930.000			36.383		109.149.000
e	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (Mtbm)	Formulir			36.310		18.155.000			36.383		18.191.500

f	Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)	Buku			36.310		907.750.000			36.383		1.455.320.000
g	Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang			1.856							
h	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			2.129							
i	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			3.231							
<b>4</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Balita</b>				<b>81.867</b>		<b>21.961.809.170</b>		<b>85.961</b>			
a	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) Atau Instrumen Standar Lain Yang Berlaku	Dokumen			81.867		4.502.698.200			85.961		4.727.833.110
b	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir			81.867		327.468.960			85.961		343.842.408
c	Buku Kartu Ibu Dan Anak (KIA)	Buku			81.867		701.200.000			85.961		3.438.424.080
d	Vitamin A Biru	Kapsul			91.035		136.551.791			95.586		143.379.381
e	Vitamin A Merah	Kapsul			150.245		225.368.089			157.758		236.636.493
f	Vaksin Imunisasi Dasar: HBO	Vaksin			164.894		247.341.000					
g	Vaksin Imunisasi Dasar: BCG	Vaksin			20.467		61.400.730					
h	Vaksin Imunisasi Dasar: Polio	Vaksin			13.645		136.446.400					
i	Vaksin Imunisasi Dasar: IPV	Vaksin			41.224		2.473.416.000					
j	Vaksin Imunisasi Dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin			41.224		1.648.944.000					
k	Vaksin Imunisasi Dasar: Campak	Vaksin			41.224		2.885.652.000					
l	Vaksin Imunisasi Dasar: Rubella	Vaksin					-					
m	Vaksin Imunisasi Lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin			41.224		1.648.944.000					
n	Vaksin Imunisasi Lanjutan : Campak	Vaksin			41.224		2.885.652.000					
o	Vaksin Imunisasi Lanjutan : Rubella	Vaksin					-					
p	Jarum Suntik Dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit			164.894		659.576.000					
q	Peralatan Anafilaktik	Paket			164.894		4.122.350.000					
r	Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang			822					822		
s	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			2.129					2.129		
t	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			3.231					3.231		

u	Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	Orang			3.231					3.231		
v	Tenaga Kesehatan : Kader Kesehatan	Orang			3.290					3.290		
w	Tenaga Non Kesehatan : Guru PAUD	Orang			4.495					4.495		
<b>5</b>	<b>Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar</b>				<b>436.945</b>			<b>23.219.692.485</b>	<b>480.639</b>			<b>28.597.007.505</b>
a	Buku Raport Kesehatanku	Buku			436.945			19.662.510.285		480.639		24.031.957.015
b	Buku Pemantauan Kesehatan	Buku			64.797			1.943.901.300		71.276		2.494.673.335
c	Kuesioner Skrining Kesehatan	Dokumen			508.135			1.524.403.980		558.948		1.956.318.441
d	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dan Remaja Di Dalam Sekolah	Dokumen			29.557			88.670.010		32.512		113.793.180
e	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Dan Remaja Di Luar Sekolah	Formulir			69			206.910		76		265.535
f	Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Gigi	Orang			1.232							
g	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			2.129							
h	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			3.231							
i	Tenaga Kesehatan : Ahli Gizi	Orang			3.231							
j	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang			3.231							
k	Tenaga Kesehatan : Kader Kesehatan	Orang			43.694					48.064		
l	Tenaga Non Kesehatan : Guru	Orang			150					180		
<b>6</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</b>				<b>736.411</b>			<b>4.228.406.670</b>	<b>736.411</b>			<b>4.228.406.670</b>
a	Pedoman Dan Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman			160			793.000.000		160		793.000.000
b	Alat Ukur Berat Badan	Unit			231			207.900.000		231		207.900.000
c	Alat : Alat Ukur Tinggi Badan	Unit			231			24.255.000		231		24.255.000
d	Alat : Alat Ukur Lingkar Perut	Unit			231			12.705.000		231		12.705.000
e	Alat : Tensimeter	Unit			231			310.695.000		231		310.695.000
f	Alat : Glukometer	Unit			231			69.300.000		231		69.300.000





<b>10</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat</b>		<b>3.597</b>	<b>3.597</b>				<b>3.597</b>	<b>3.597</b>			
a	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) Atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa Terbaru (Bila Sudah Tersedia)	Buku			<b>80</b>		<b>16.000.000</b>			<b>80</b>		<b>16.000.000</b>
b	Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	Paket			<b>92</b>		<b>184.000.000</b>			<b>92</b>		<b>184.000.000</b>
c	Penyediaan Formulir Pencatatan Dan Pelaporan	Orang			<b>3.597</b>		<b>1.079.100</b>			<b>3.597</b>		<b>1.079.100</b>
d	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media			<b>80</b>		<b>20.000.000</b>			<b>80</b>		<b>20.000.000</b>
e	Tenaga Kesehatan : Dokter	Orang			<b>21</b>		<b>8.152.375</b>					
f	Tenaga Kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang			<b>6</b>		<b>798.600</b>					
g	Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya	Orang			<b>21</b>		<b>8.152.375</b>					
<b>11</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</b>		<b>38.082</b>	<b>38.082</b>			<b>8.980.688.536</b>	<b>34.851</b>	<b>34.851</b>			<b>8.249.108.348</b>
a	Media Kie (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media			<b>80</b>	<b>80</b>	<b>31.000.000</b>			<b>80</b>	<b>80</b>	<b>31.000.000</b>
b	Reagen Zn Tb	Paket			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>269.000.000</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>269.000.000</b>
c	Masker Jenis Rumah Tangga Dan Masker N95	Paket			<b>11.736</b>	<b>11.736</b>	<b>152.568.000</b>			<b>11.071</b>	<b>11.071</b>	<b>143.923.000</b>
d	Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengereng	Paket			<b>376.128</b>	<b>376.128</b>	<b>1.241.222.400</b>			<b>344.208</b>	<b>344.208</b>	<b>1.135.886.400</b>
e	Catridge Tes Cepat Molekuler	Paket			<b>38.082</b>	<b>38.082</b>	<b>7.279.298.136</b>			<b>34.851</b>	<b>34.851</b>	<b>6.661.698.948</b>
f	Formulir Pencatatan Dan Pelaporan	Dokumen			<b>80</b>	<b>80</b>	<b>1.352.000</b>			<b>80</b>	<b>80</b>	<b>1.352.000</b>
g	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (Sop)	Dokumen			<b>80</b>	<b>80</b>	<b>6.248.000</b>			<b>80</b>	<b>80</b>	<b>6.248.000</b>
h	Dokter/ Dokter Spesialis Penyakit Dalam/ Dokter Spesialis Paru	Orang			<b>213</b>		-					
i	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			<b>340</b>		-					
j	Tenaga Kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (Atlm)	Orang			<b>83</b>		-					
k	Tenaga Kesehatan : Penata Rontgen	Orang			<b>0</b>		-					
l	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			<b>140</b>		-					

m	Tenaga Non Kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi Tertentu	Orang			614		-					
12	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)</b>		49.254	49.254			43.833.606.612	51.617	51.617		27.180.812.605	
a	Media Kie (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media			56.642	56.642	24.690.291.390			59.360	59.360	25.874.827.845
b	Tes Cepat Hiv (Rdt) Pertama	Paket			56.642	56.642	1.189.484.100			59.360	59.360	1.246.550.550
c	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit Yang Sesuai/Vacutainer Dan Jarum Sesuai	Paket			56.642	56.642	71.942			59.360	59.360	74.660
d	Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter Spesialis Penyakit Dalam/Dokter Spesialis Kulit Dan Kelamin	Paket			56.642	56.642	56.642.100			59.360	59.360	59.359.550
e		Orang			300	300	3.000.000.000					
f	Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang			514	514	3.598.000.000					
g	Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang			497	497	3.598.000.000					
h	Tenaga Kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (Atlm)	Orang			138	138	3.598.000.000					
i	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			188	188	3.598.000.000					
j	Tenaga Non Kesehatan Terlatih Atau Mempunyai Kualifikasi Tertentu	Orang			120	120	505.117.080					



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rp)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
c	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	2.060			200	200				220	220			APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perumda Tirtawening
d	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	2.060			200	200				220	220			APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perumda Tirtawening
2	<b>Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik- Satuan KK/SR</b>		1.773	2.175	2.175			1.074.508.254	2.100	2.100			3.775.036.798		APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perumda Tirtawening
a	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	591			725	725				700	700			APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perumda Tirtawening
b	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah	Rumah Tangga	500			500	500				500	500			APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perumda Tirtawening

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rp)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T															
c	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	91			-	-				-	-			APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perumda Tirtawening

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2027)					Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rp)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Orang	19.881	19.020	19.020			2.674.502.021	266.367	266.367			3.209.402.425		APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perumda Tirtawening

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2027)					Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rp)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<b>Jaringan Perpipaan</b>															
a	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	4.567			6.100	6.100				88.529	88.529			APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perumda Tirtawening
b	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	4.567			6.100	6.100				88.529	88.529			APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perumda Tirtawening
	<b>Bukan Jaringan Perpipaan</b>															
c	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	2.060			240	240				260	260			APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perumda Tirtawening

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2027)					Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rp)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
d	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau	Rumah Tangga	2.060			240	240				260	260			APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perumda Tirtawening
2	<b>Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik- Satuan KK/SR</b>		1.773	2.025	2.025			4.530.044.158	1.950	1.950			5.436.052.989		APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perumda Tirtawening
a	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	591			675	675				650	650			APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perumda Tirtawening
b	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja	Rumah Tangga	500			500	500				500	500			APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perumda Tirtawening

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2027)					Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rp)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T															
c	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	91			-	-				-	-			APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perumda Tirtawening

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Orang	19.881	266.367	266.367			3.209.402.425		APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perumda Tirtawening
	Jaringan Perpipaan										
a	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	4.567			88.529	88.529			APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perumda Tirtawening

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
b	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	4.567			88.529	88.529			APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perumda Tirtawening
<b>Bukan Jaringan Perpipaan</b>											
c	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	2.060			260	260			APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perumda Tirtawening
d	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	2.060			260	260			APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perumda Tirtawening
2	<b>Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik- Satuan KK/SR</b>		1.773	1.950	1.950			5.436.052.989		APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perumda Tirtawening
a	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air	Rumah Tangga	591			650	650			APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perumda Tirtawening

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17
	Limbah Domestik										
b	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	500			500	500			APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perumda Tirtawening
c	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	91			-	-			APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perumda Tirtawening

**3.2.4. Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat**

**Tabel 3.11  
Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Perumahan  
Rakyat Tahun 2025-2029**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)					Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rp)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>Penyediaan &amp; Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b>	<i>Orang</i>	352	146	146			4.380.000.000	100	100			3.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	<i>Rumah</i>	88			146	146	4.380.000.000			100	100	3.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	<i>Rumah</i>	-			-	-				-	-				
3	Pemukiman kembali bagi korban bencana	<i>Rumah</i>	-			-	-				-	-				
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	<i>Rumah</i>	-			-	-	-			-	-				
2	<b>Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<i>Orang</i>	60	48	48			345.600.000	70	70			504.000.000		APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	<i>Rumah</i>	15													
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	<i>Rumah</i>	-	-	-				-	-						
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat;	<i>Rumah</i>	15	-	-				-	-						



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2027)					Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rp)	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Orang	60					-					-			
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	15													
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah	-	-	-				-	-						
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah	15	-	-				-	-						
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah	-	-	-				-	-						
2	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	15			-	-	-			-	-	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah	352	100	100			3.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	88			100	100	3.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	-			-	-				
3	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah	-			-	-				
4	Bantuan akses rumah	Rumah	-			-	-	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rp)			
1	2	3	4	10	11	12	13	14	15	16	17
	sewa layak huni bagi korban bencana										
<b>2</b>	<b>Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<i>Orang</i>	<b>60</b>					-			
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	<i>Rumah</i>	<b>15</b>								
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	<i>Rumah</i>	-	-	-						
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	<i>Rumah</i>	<b>15</b>	-	-						
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	<i>Rumah</i>	-	-	-						
2	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	<i>Rumah</i>	15			-	-	-			

**3.2.5. Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas**

**Tabel 3.12  
Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Trantibum Tahun 2025-2029**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	<b>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)</b>	<i>orang</i>	4	246	246			29.010.106.986		APBD	SATPOL PP	150				31.050.473.104		APBD	SATPOL PP
1	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	<i>unit</i>	469			469	469	40.430.000						469	469	188.666.100			
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan)	<i>dokumen</i>	15			15	15	-						7	7	-			

	penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)																	
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang	567		693	693	7.717.214.269					693	693	1.942.276.424				
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap	dokumen	1		-	-	21.252.462.717					-	-	28.919.530.580				

	<p>elayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal</p>																	
5	<p>Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)</p>	orang	-		-	-	-					-	-	-				
6	<p>Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang</p>	orang	-		-	-	-					-	-	-				

dan/atau berat)																		
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	<b>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)</b>	<i>orang</i>	150	-			34.155.520.414				150	-			37.571.072.456		APBD	SATPOL PP
1	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	<i>unit</i>			469	469	207.532.710		APBD	SATPOL PP			469	469	228.285.981			
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan)	<i>dokumen</i>			7	7	-						7	7	-			

	massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)																
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang			693	693	2.136.504.066					693	693	2.350.154.473			
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian	dokumen			-	-	31.811.483.638					-	-	34.992.632.002			

	material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal																	
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang			-	-	-					-	-	-				
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang			-	-	-					-	-	-				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	37	38	39	40	41	42	43	44	37	38	39	40	41	42	43	44
1	<b>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)</b>	<i>orang</i>	150	-			41.328.179.701		APBD	SATPOL PP	150	-			45.460.997.672		APBD	SATPOL PP
1	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	<i>unit</i>			469	469	251.114.579						469	469	276.226.037			
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan	<i>dokumen</i>			7	7	0						7	7	0			

	tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)																
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang			693	693	2.585.169.920					693	693	2.843.686.912			
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan	dokumen			-	-	38.491.895.202					-	-	42.341.084.722			

	elayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal																	
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang			-	-	-					-	-	-				
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang			-	-	-					-	-	-				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)		963.932	963.933	963.933			154.726.000	Diskar	APBD	DAMKAR PB	963.933	963.933			664.076.802	-	APBD	BPBD

a	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1			1	1			APBD	DAMKAR PB			1	1	500.000.000		APBD	BPBD
b	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	963.932			963.933	963.933	34.320.000		APBD	DAMKAR PB			963.933	963.933	40.360.326		APBD	BPBD
c	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	963.932			800	800	120.406.000		APBD	DAMKAR PB			850	850	123.716.476		APBD	BPBD
d	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	391			500	500	-		APBD	DAMKAR PB			-	-			APBD	BPBD
<b>3</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>		1.500	1.660	1.660			<b>3.550.000.000</b>		<b>APBD</b>	<b>DAMKAR PB</b>	1.770	1.770			<b>2.793.878.148</b>	-	<b>APBD</b>	<b>BPBD</b>
a	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)	unit	61			61	61	1.482.740.121		APBD	DAMKAR PB			1		1.482.740.121		APBD	BPBD
b	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	orang	1500			1.660	1.660	1.272.881.000		APBD	DAMKAR PB			1.770		1.311.138.027		APBD	BPBD
<b>4</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>		500	550	550			<b>1.731.795.000</b>	-	<b>APBD</b>	<b>DAMKAR PB</b>	600	600			<b>196.261.452</b>	-	<b>APBD</b>	<b>BPBD</b>
a	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	1			1	1	-			DAMKAR PB			1	1	-		APBD	BPBD
b	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	orang	1			550	550	166.888.900		APBD	DAMKAR PB			600	600	196.261.452		APBD	BPBD
c	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	dokumen	1			4	4	-		APBD	DAMKAR PB			4	4	-		APBD	BPBD

d	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	-			1	1	-		APBD	DAMKAR PB			1	1	-		APBD	BPBD
e	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	1			1	1	-		APBD	DAMKAR PB			1	1	-		APBD	BPBD
5	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)</b>		353	353	353			23.653.317.378				353	353			24.244.650.312			
a	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	353			353	353	17.559.597.512		APBD	DAMKAR			353	353	17.998.587.450		APBD	DAMKAR
b	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	20			41	41			APBD	DAMKAR			41	41			APBD	DAMKAR
c	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	1.729			1.730	1.730	5.564.144.866		APBD	DAMKAR			1.735	1.735	5.703.248.488		APBD	DAMKAR
d	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	orang	382			382	382	260.535.000		APBD	DAMKAR			382	382	267.048.375		APBD	DAMKAR
e	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	353			239	239	134.520.000		APBD	DAMKAR			239	239	137.883.000		APBD	DAMKAR

f	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	55			55	55	134.520.000		APBD	DAMKAR			55	55	137.883.000		APBD	DAMKAR
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----	--	--	----	----	-------------	--	------	--------	--	--	----	----	-------------	--	------	--------

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)				
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran
2	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)</b>		963.933	963.933			668.174.608		APBD	BPBD	963.933	963.933			172.378.973
a	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen			1	1	500.000.000		APBD	BPBD			-	-	-
b	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang			963.933	963.933	41.369.320		APBD	BPBD			963.933	963.933	42.403.553
c	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang			900	900	126.805.288		APBD	BPBD			923	923	129.975.420
d	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit			-	-	-		APBD	BPBD			-	-	-

<b>3</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>		1.880	1.880			<b>1.343.916.478</b>	-	<b>APBD</b>	<b>BPBD</b>	1.927	<b>1.927</b>			<b>1.377.514.390</b>
a	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)	<i>unit</i>			1	1	-		APBD	BPBD			1	1	-
b	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	<i>orang</i>			1.880	1.880	1.343.916.478		APBD	BPBD			1.927	1.927	1.377.514.390
<b>4</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>		650	<b>650</b>			<b>201.167.989</b>	-	<b>APBD</b>	<b>BPBD</b>	666	<b>666</b>			<b>206.197.189</b>
a	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	<i>posko</i>			1	1	-		APBD	BPBD			1	1	-
b	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	<i>orang</i>			650	650	201.167.989		APBD	BPBD			666	666	206.197.189
c	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	<i>dokumen</i>			4	4	-		APBD	BPBD			4	4	-

d	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan			1	1	-		APBD	BPBD			1	1	-
e	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan			1	1	-		APBD	BPBD			1	1	-
<b>5</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)</b>		<b>353</b>	<b>353</b>			<b>24.850.766.570</b>						<b>353</b>	<b>353</b>	<b>25.472.035.735</b>
a	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan			<b>353</b>	<b>353</b>	<b>18.448.552.136</b>		<b>APBD</b>	<b>DAMKAR</b>			<b>353</b>	<b>353</b>	<b>18.909.765.939</b>
b	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen			<b>41</b>	<b>41</b>	-		<b>APBD</b>	<b>DAMKAR</b>			<b>41</b>	<b>41</b>	-
c	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil	unit			<b>1.740</b>	<b>1.740</b>	<b>5.845.829.700</b>		<b>APBD</b>	<b>DAMKAR</b>			<b>1.745</b>	<b>1.745</b>	<b>5.991.975.442</b>

	damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)														
d	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	orang			382	382	273.724.584		APBD	DAMKAR			382	382	280.567.699
e	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan			239	239	141.330.075		APBD	DAMKAR			239	239	144.863.327
f	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan			55	55	141.330.075		APBD	DAMKAR			55	55	144.863.327

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2028)					Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)		963.933	963.933			176.688.448	963.933	963.933			181.105.659		APBD	BPBD	

a	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen			-	-	-			-	-	-		APBD	BPBD
b	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang			963.933	963.933	43.463.642			963.933	963.933	44.550.233		APBD	BPBD
c	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang			12	12	133.224.806			12	12	136.555.426		APBD	BPBD
d	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit			-	-	-			-	-	-		APBD	BPBD
<b>3</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>		<b>1.935</b>	<b>1.935</b>			<b>1.411.952.250</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			<b>1.447.251.056</b>	<b>-</b>	<b>APBD</b>	<b>BPBD</b>
a	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)	unit			1	1	-			50	50	-		APBD	BPBD
b	Peningkatan kapasitas personil/ Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	orang			<b>1.935</b>	<b>1.935</b>	<b>1.411.952.250</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.447.251.056</b>		APBD	BPBD

<b>4</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>		<b>667</b>	<b>667</b>			<b>211.352.118</b>	<b>700</b>	<b>700</b>			<b>216.635.921</b>	-	<b>APBD</b>	<b>BPBD</b>
a	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	<i>posko</i>			1	1	-			1	1	-		APBD	BPBD
b	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	<i>orang</i>			667	667	<b>211.352.118</b>			700	700	<b>216.635.921</b>		APBD	BPBD
c	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	<i>dokumen</i>			4	4	-			4	4	-		APBD	BPBD
d	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	<i>layanan</i>			1	1	-			1	1	-		APBD	BPBD
e	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	<i>layanan</i>			1	1	-			1	1	-		APBD	BPBD
<b>5</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)</b>		<b>353</b>	<b>353</b>			<b>26.108.836.628</b>								

a	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan			353	353	19.382.510.088						APBD	DAMKAR
b	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen			41	41	-						APBD	DAMKAR
c	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit			1.745	1.745	6.141.774.828						APBD	DAMKAR
d	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	orang			382	382	287.581.891						APBD	DAMKAR
e	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan	layanan			239	239	148.484.910						APBD	DAMKAR

	evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)																		
f	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan			55	55	148.484.910										APBD	DAMKAR	

**Tabel 3.13**  
**Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Linmas Tahun 2025-2029**

**BIDANG SATPOL PP**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	<b>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)</b>	orang	4	246	246			29.010.106.986		APBD	SATPOL PP	150				31.050.473.104		APBD	SATPOL PP
1	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis	unit	469			469	469	40.430.000						469	469	188.666.100			

	truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)																	
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	<i>dokumen</i>	15		15	15	-					7	7	-				
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan	<i>orang</i>	567		693	693	7.717.214.269					693	693	1.942.276.424				

	Perlindungan Masyarakat/Satlin mas)																	
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	<i>dokumen</i>	1			-	-	21.252.462.717					-	-	28.919.530.580			
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	<i>orang</i>	-			-	-						-	-	-			
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat	<i>orang</i>	-			-	-						-	-	-			

	kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)																		
--	-----------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
2	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)</b>		963.932	963.933	963.933			154.726.000	Diskar	APBD	DAMKAR PB	963.933	963.933			664.076.802	-	APBD	BPBD
a	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1			1	1			APBD	DAMKAR PB			1	1	500.000.000		APBD	BPBD
b	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	963.932			963.933	963.933	34.320.000		APBD	DAMKAR PB			963.933	963.933	40.360.326		APBD	BPBD
c	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	963.932			800	800	120.406.000		APBD	DAMKAR PB			850	850	123.716.476		APBD	BPBD
d	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	391			500	500	-		APBD	DAMKAR PB			-	-			APBD	BPBD

<b>3</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>							<b>3.550.000.000</b>		<b>APBD</b>	<b>DAMKAR PB</b>		<b>1.770</b>			<b>2.793.878.148</b>	<b>-</b>	<b>APBD</b>	<b>BPBD</b>
			1.500	1.660	1.660							1.770							
a	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)	unit	61			61	61	1.482.740.121		APBD	DAMKAR PB			1		1.482.740.121		APBD	BPBD
b	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	orang	1500			1.660	1.660	1.272.881.000		APBD	DAMKAR PB			1.770		1.311.138.027		APBD	BPBD
<b>4</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>							<b>1.731.795.000</b>	<b>-</b>	<b>APBD</b>	<b>DAMKAR PB</b>		<b>600</b>			<b>196.261.452</b>	<b>-</b>	<b>APBD</b>	<b>BPBD</b>
			500	550	550							600							
a	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	1			1	1	-						1	1	-		APBD	BPBD
b	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	orang	1			550	550	166.888.900		APBD	DAMKAR PB			600	600	196.261.452		APBD	BPBD
c	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	dokumen	1			4	4	-		APBD	DAMKAR PB			4	4	-		APBD	BPBD

d	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	-			1	1	-		APBD	DAMKAR PB			1	1	-		APBD	BPBD
e	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	1			1	1	-		APBD	DAMKAR PB			1	1	-		APBD	BPBD
<b>5</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)</b>		<b>353</b>	<b>353</b>	<b>353</b>			<b>23.653.317.378</b>				<b>353</b>	<b>353</b>			<b>24.244.650.312</b>			
a	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	<b>353</b>			<b>353</b>	<b>353</b>	<b>17.559.597.512</b>		<b>APBD</b>	<b>DAMKAR</b>			<b>353</b>	<b>353</b>	<b>17.998.587.450</b>		<b>APBD</b>	<b>DAMKAR</b>
b	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	<b>20</b>			<b>41</b>	<b>41</b>			<b>APBD</b>	<b>DAMKAR</b>			<b>41</b>	<b>41</b>			<b>APBD</b>	<b>DAMKAR</b>
c	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil	unit	<b>1.729</b>			<b>1.730</b>	<b>1.730</b>	<b>5.564.144.866</b>		<b>APBD</b>	<b>DAMKAR</b>			<b>1.735</b>	<b>1.735</b>	<b>5.703.248.488</b>		<b>APBD</b>	<b>DAMKAR</b>

	damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)																		
d	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	orang	382			382	382	260.535.000		APBD	DAMKAR			382	382	267.048.375		APBD	DAMKAR
e	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	353			239	239	134.520.000		APBD	DAMKAR			239	239	137.883.000		APBD	DAMKAR
f	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	55			55	55	134.520.000		APBD	DAMKAR			55	55	137.883.000		APBD	DAMKAR

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	Pelayanan Ketertarikan dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	orang	4	150	-			34.155.520.414				150	-			37.571.072.456		APBD	SATPOL PP

1	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	unit	469		469	469	207.532.710		APBD	SATPOL PP		469	469	228.285.981			
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen	15		7	7	-					7	7	-			
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan	orang	567		693	693	2.136.504.066					693	693	2.350.154.473			

	kapasitas SDM (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlin mas)																	
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	<i>dokumen</i>	1		-	-	31.811.483.638					-	-	34.992.632.002				
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	<i>orang</i>	-		-	-	-					-	-	-				
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan	<i>orang</i>	-		-	-	-					-	-	-				

	ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)																		
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44	37	38	39	40	41	42	43	44
1	<b>Pelayanan Ketertarikan dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)</b>	orang	4	150	-			41.328.179.701		APBD	SATPOL PP	150	-			45.460.997.672		APBD	SATPOL PP
1	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	unit	469			469	469	251.114.579						469	469	276.226.037			
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan	dokumen	15			7	7	0						7	7	0			

	pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)																	
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	orang	567			693	693	2.585.169.920					693	693	2.843.686.912			
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan)	dokumen	1			-	-	38.491.895.202					-	-	42.341.084.722			

	dalam bentuk dokumen yang sah dan legal																	
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	-			-	-	-						-	-	-		
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	-			-	-	-						-	-	-		

**BIDANG BPBD**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)		963.932	963.933	963.933			154.726.000	Diskar	APBD	DAMKAR PB	963.933	963.933			664.076.802	-	APBD	BPBD

a	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1			1	1			APBD	DAMKAR PB			1	1	500.000.000		APBD	BPBD
b	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	963.932			963.933	963.933	34.320.000		APBD	DAMKAR PB			963.933	963.933	40.360.326		APBD	BPBD
c	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	963.932			800	800	120.406.000		APBD	DAMKAR PB			850	850	123.716.476		APBD	BPBD
d	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	391			500	500	-		APBD	DAMKAR PB			-	-			APBD	BPBD
<b>3</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>		1.500	1.660	1.660			<b>3.550.000.000</b>		<b>APBD</b>	<b>DAMKAR PB</b>	1.770	1.770			<b>2.793.878.148</b>	-	<b>APBD</b>	<b>BPBD</b>
a	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)	unit	61			61	61	1.482.740.121		APBD	DAMKAR PB			1		1.482.740.121		APBD	BPBD
b	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	orang	1500			1.660	1.660	1.272.881.000		APBD	DAMKAR PB			1.770		1.311.138.027		APBD	BPBD
<b>4</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>		500	550	550			<b>1.731.795.000</b>	-	<b>APBD</b>	<b>DAMKAR PB</b>	600	600			<b>196.261.452</b>	-	<b>APBD</b>	<b>BPBD</b>

a	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	1			1	1	-		DAMKAR PB			1	1	-		APBD	BPBD
b	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	orang	1			550	550	166.888.900		APBD	DAMKAR PB		600	600	196.261.452		APBD	BPBD
c	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	dokumen	1			4	4	-		APBD	DAMKAR PB		4	4	-		APBD	BPBD
d	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	-			1	1	-		APBD	DAMKAR PB		1	1	-		APBD	BPBD
e	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	1			1	1	-		APBD	DAMKAR PB		1	1	-		APBD	BPBD
<b>5</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)</b>		<b>353</b>	<b>353</b>	<b>353</b>			<b>23.653.317.378</b>				<b>353</b>	<b>353</b>		<b>24.244.650.312</b>			
a	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan	layanan	353			353	353	17.559.597.512		APBD	DAMKAR		353	353	17.998.587.450		APBD	DAMKAR

	pemadam kebakaran/redkar)																	
b	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	20		41	41			APBD	DAMKAR			41	41			APBD	DAMKAR
c	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	1.729		1.730	1.730	5.564.144.866		APBD	DAMKAR			1.735	1.735	5.703.248.488		APBD	DAMKAR
d	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	orang	382		382	382	260.535.000		APBD	DAMKAR			382	382	267.048.375		APBD	DAMKAR
e	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	353		239	239	134.520.000		APBD	DAMKAR			239	239	137.883.000		APBD	DAMKAR
f	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial	layanan	55		55	55	134.520.000		APBD	DAMKAR			55	55	137.883.000		APBD	DAMKAR

	akibat kebakaran)																	
--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2026)			Inisiasi	Sumber Pendanaan		Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	
2	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)</b>		963.932	963.933	963.933			668.174.608		APBD	BPBD	963.933	963.933			172.378.973
a	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1			1	1	500.000.000		APBD	BPBD			-	-	-
b	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	963.932		963.933	963.933	963.933	41.369.320		APBD	BPBD			963.933	963.933	42.403.553
c	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	963.932		900	900	900	126.805.288		APBD	BPBD			923	923	129.975.420
d	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	391		-	-	-	-		APBD	BPBD			-	-	-
3	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>		1.500	1.880	1.880			1.343.916.478	-	APBD	BPBD	1.927	1.927			1.377.514.390
a	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum,	unit	61		1	1	1	-		APBD	BPBD			1	1	-

	tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)															
b	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	<i>orang</i>	1500			1.880	1.880	1.343.916.478		APBD	BPBD			1.927	1.927	1.377.514.390
4	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>		500	650	650			201.167.989	-	APBD	BPBD	666	666			206.197.189
a	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	<i>posko</i>	1			1	1	-		APBD	BPBD			1	1	-
b	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	<i>orang</i>	1			650	650	201.167.989		APBD	BPBD			666	666	206.197.189
c	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	<i>dokumen</i>	1			4	4	-		APBD	BPBD			4	4	-
d	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	<i>layanan</i>	-			1	1	-		APBD	BPBD			1	1	-
e	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	<i>layanan</i>	1			1	1	-		APBD	BPBD			1	1	-
5	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban</b>		353	353	353			24.850.766.570				353	353			25.472.035.735

	<b>Kebakaran (DAMKAR)</b>															
a	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	<i>layanan</i>	<b>353</b>		<b>353</b>	<b>353</b>	<b>18.448.552.136</b>		<b>APBD</b>	<b>DAMKAR</b>			<b>353</b>	<b>353</b>	<b>18.909.765.939</b>	
b	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	<i>dokumen</i>	<b>20</b>		<b>41</b>	<b>41</b>	-		<b>APBD</b>	<b>DAMKAR</b>			<b>41</b>	<b>41</b>	-	
c	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	<i>unit</i>	<b>1.729</b>		<b>1.740</b>	<b>1.740</b>	<b>5.845.829.700</b>		<b>APBD</b>	<b>DAMKAR</b>			<b>1.745</b>	<b>1.745</b>	<b>5.991.975.442</b>	
d	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	<i>orang</i>	<b>382</b>		<b>382</b>	<b>382</b>	<b>273.724.584</b>		<b>APBD</b>	<b>DAMKAR</b>			<b>382</b>	<b>382</b>	<b>280.567.699</b>	
e	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	<i>layanan</i>	<b>353</b>		<b>239</b>	<b>239</b>	<b>141.330.075</b>		<b>APBD</b>	<b>DAMKAR</b>			<b>239</b>	<b>239</b>	<b>144.863.327</b>	

f	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	55			55	55	141.330.075		APBD	DAMKAR			55	55	144.863.327
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----	--	--	----	----	-------------	--	------	--------	--	--	----	----	-------------

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2028)					Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
2	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)</b>		963.932	963.933			176.688.448	963.933	963.933			181.105.659		APBD	BPBD	
a	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1			-	-	-	-	-	-	-		APBD	BPBD	
b	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	963.932			963.933	963.933	43.463.642			963.933	963.933	44.550.233	APBD	BPBD	
c	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	963.932			12	12	133.224.806			12	12	136.555.426	APBD	BPBD	
d	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	391			-	-	-			-	-	-	APBD	BPBD	
3	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>		1.500	1.935	1.935			1.411.952.250	2.000	2.000			1.447.251.056	-	APBD	BPBD

a	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)	unit	61			1	1	-			50	50	-		APBD	BPBD
b	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	orang	1500			1.935	1.935	1.411.952.250			2.000	2.000	1.447.251.056		APBD	BPBD
4	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>		500	667	667			211.352.118	700	700			216.635.921	-	APBD	BPBD
a	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	1			1	1	-			1	1	-		APBD	BPBD
b	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	orang	1			667	667	211.352.118			700	700	216.635.921		APBD	BPBD
c	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	dokumen	1			4	4	-			4	4	-		APBD	BPBD
d	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	-			1	1	-			1	1	-		APBD	BPBD
e	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	1			1	1	-			1	1	-		APBD	BPBD

5	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)</b>		353					26.108.836.628							
a	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	353			353	353	19.382.510.088						APBD	DAMKAR
b	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen	20			41	41	-						APBD	DAMKAR
c	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit	1.729			1.745	1.745	6.141.774.828						APBD	DAMKAR
d	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	orang	382			382	382	287.581.891						APBD	DAMKAR
e	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan	layanan	353			239	239	148.484.910						APBD	DAMKAR

	evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)																		
f	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	55			55	55	148.484.910										APBD	DAMKAR

### 3.2.6. Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Sosial

**Tabel 3.14**  
**Rencana Aksi Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2025-2029**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rp.)				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran (Rp.)			
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial		891	980	980			1.590.825.261		APBD	DINAS SOSIAL	1078	1078			3.528.355.605		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	20			22	22	204.449.690						24	24	204.400.016			
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang	47			52	52	63.992.892						81	81	69.467.304			
c	Penyediaan Permakanan	orang	752			827	827	853.871.538						358	358	787.475.401			
d	Penyediaan Sandang	orang	76			84	84	116.641.993						121	121	55.497.842			
e	Penyediaan Alat Bantu	pcs	127			140	140	146.753.560						814	814	2.047.025.111			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	3			3	3	-						3	3	-			

g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	orang	454			499	499	156.633.479						215	215	307.655.560			
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	orang	99			109	109	15.661.537						36	36	22.167.706			
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	orang	10			11	11	-						11	11	-			
j	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	orang	224			246	246	-						426	426	-			
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	35			39	39	-						39	39	-			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	19			21	21	-						20	20	-			
m	Layanan Rujukan	orang	39			43	43	32.820.572						50	50	34.666.667			
<b>2</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial</b>	orang	<b>210</b>	<b>231</b>	<b>231</b>			<b>637.443.592</b>		<b>APBD</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>254</b>	<b>254</b>			<b>666.008.160</b>		<b>APBD</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	150			165	165	204.449.690						182	182	204.400.016			
b	Penyediaan Permakanan	orang	150			165	165	148.259.232						71	71	157.076.210			
c	Penyediaan Sandang	orang	103			113	113	67.860.907						164	164	75.214.180			
d	Penyediaan Alat Bantu	orang	1			2	2	2.094.090						0	0	-			

e	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	2			2	2						2	2	-			
f	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	154			169	169	52.906.017					35	35	49.468.845			
g	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Anak Terlantar	orang	73			80	80	11.095.313					26	26	16.345.884			
h	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang	4			4	4						4	4	-			
i	Akses ke Layanan Pendidikan	orang	3			3	3						3	3	-			
j	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	57			63	63						67	67	-			
k	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	69			76	76						86	86	-			
l	Layanan Rujukan	orang	16			18	18	13.742.881					18	18	14.222.222			
m	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang	101			111	111	137.035.462					175	175	149.280.802			
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu	orang	0			0	0						0	0	-			

	Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru																		
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang	0			0	0						0	0					
3	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial</b>	orang	<b>891</b>	<b>980</b>	<b>980</b>			<b>1.521.704.059</b>		<b>APBD</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>1078</b>	<b>1078</b>			<b>1.760.321.971</b>		<b>APBD</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	<b>121</b>			133	133	204.449.690						146	146	204.400.016			
b	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang	<b>99</b>			109	109	134.557.010						171	171	146.324.746			
c	Penyediaan Permakanan	orang	<b>885</b>			974	974	872.229.561						421	421	926.749.641			
d	Penyediaan Sandang	orang	<b>112</b>			123	123	114.145.674						178	178	81.786.293			
e	Penyediaan Alat Bantu	orang	<b>2</b>			2	2	2.094.090						10	10	32.236.616			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	<b>2</b>			2	2							2	2	-			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	<b>509</b>			560	560	175.247.368						241	241	344.926.608			

h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Lanjut Usia Terlantar	orang	71		86	86	11.354.465					26	26	15.898.052			
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	orang	43		47	47						63	63	-			
j	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar/Fasilitasi layanan kesehatan	orang	8		9	9						8	8	-			
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	105		116	116						140	140	-			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	78		86	86						99	99	-			
m	Layanan Rujukan	orang	9		10	10	7.626.201					10	10	8.000.000			
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang	0		0	0						0	0	-			
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan	orang	0		0	0						0	0	-			

	Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru																		
<b>4</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	orang	<b>753</b>	<b>828</b>	<b>828</b>			<b>2.059.176.496</b>		<b>APBD</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>911</b>	<b>911</b>			<b>2.081.211.569</b>		<b>APBD</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang	<b>132</b>			145	145	204.449.690						160	160	204.400.016			
b	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang	<b>447</b>			492	492	606.774.586						773	773	660.678.399			
c	Penyediaan Permakanan	orang	<b>735</b>			809	809	724.118.750						350	350	769.673.431			
d	Penyediaan Sandang	orang	<b>462</b>			508	508	197.902.523						736	736	337.368.460			
e	Penyediaan Alat Bantu	orang	<b>1</b>			2	2	2.094.090						0	0	-			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang	<b>9</b>			10	10							10	10	-			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	<b>747</b>			822	822	256.524.576						24	24	34.560.426			
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Gelandangan dan Pengemis Terlantar	orang	<b>51</b>			56	56	7.764.685						18	18	11.419.727			
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau	orang	<b>36</b>			40	40							50	50	-			

	Kartu Identitas Anak																	
j	Akses ke Layanan Pendidikan	orang	14			15	15						15	15	-			
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang	115			127	127						157	157	-			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang	119			130	130						169	169	-			
m	Layanan Rujukan	orang	71			78	78	59.547.596					108	108	63.111.111			
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang	0			0	0						0	0	-			
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang	0			0	0						0	0	-			
5	<b>Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap</b>	orang	3476	4650	4650			820.533.018		APBD	DINAS SOSIAL	4650	4650		821.080.204		APBD	DINAS SOSIAL

	<b>Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota</b>																	
a	Penyediaan Permakanan	orang	<b>3476</b>			4565	4565	523.062.967					4650	4650	523.013.417			
b	Penyediaan Sandang	orang	<b>1669</b>			1857	1857	102.144.851					342	342	102.144.851			
c	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	unit	<b>0</b>			0	0						0	0	-			
d	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	orang	<b>0</b>			1200	1200	99.145.200					1200	1200	99.741.936			
e	Pelayanan Dukungan Psikososial	orang	<b>0</b>			565	565	96.180.000					565	565	96.180.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran(Rp.)				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran(Rp.)			
1	2	3	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
<b>1</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial</b>		<b>1186</b>	<b>1186</b>			<b>3.881.191.166</b>		<b>APBD</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>1304</b>	<b>1304</b>			<b>4.269.310.283</b>		<b>APBD</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang			27	27	224.840.017						29	29	247.324.019			
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang			89	89	76.414.034						98	98	84.055.437			
c	Penyediaan Permakanan	orang			394	394	866.222.941						433	433	952.845.235			
d	Penyediaan Sandang	orang			133	133	61.047.626						147	147	67.152.389			
e	Penyediaan Alat Bantu	pcs			896	896	2.251.727.622						985	985	2.476.900.384			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang			3	3	-						4	4	-			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang			237	237	338.421.116						260	260	372.263.227			

	dan Sosial																
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	orang			40	40	24.384.476					44	44	26.822.924			
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	orang			12	12	-					13	13	-			
j	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	orang			469	469	-					515	515	-			
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang			43	43	-					47	47	-			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang			22	22	-					24	24	-			
m	Layanan Rujukan	orang			55	55	38.133.333					61	61	41.946.667			
<b>2</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial</b>	orang	<b>280</b>	<b>280</b>			<b>732.608.976</b>		<b>APBD</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>307</b>	<b>307</b>		<b>805.869.873</b>		<b>APBD</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang			200	200	224.840.017					220	220	247.324.019			
b	Penyediaan Permakanan	orang			79	79	172.783.831					86	86	190.062.214			
c	Penyediaan Sandang	orang			181	181	82.735.598					199	199	91.009.158			
d	Penyediaan Alat Bantu	orang			0	0	-					0	0	-			
e	Penyediaan Perbekalan	orang			2	2	-					2	2	-			

	Kesehatan																
f	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang			38	38	54.415.730					42	42	59.857.303			
g	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Anak Terlantar	orang			29	29	17.980.473					31	31	19.778.520			
h	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang			4	4	-					5	5	-			
i	Akses ke Layanan Pendidikan	orang			3	3	-					4	4	-			
j	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang			74	74	-					81	81	-			
k	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang			95	95	-					104	104	-			
l	Layanan Rujukan	orang			20	20	15.644.444					22	22	17.208.889			
m	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang			192	192	164.208.882					211	211	180.629.770			
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan	orang			0	0	-					0	0	-			

	Pengadaan Kendaraan Baru																
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pemeliharaan	orang			0	0	-					0	0	-			
<b>3</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial</b>	orang	<b>1186</b>	<b>1186</b>			<b>1.936.354.168</b>		<b>APBD</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>1304</b>	<b>1304</b>		<b>2.129.989.585</b>		<b>APBD</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang			161	161	224.840.017						177	177	247.324.019		
b	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang			188	188	160.957.221						207	207	177.052.943		
c	Penyediaan Permakanan	orang			463	463	1.019.424.605						510	510	1.121.367.066		
d	Penyediaan Sandang	orang			196	196	89.964.923						216	216	98.961.415		
e	Penyediaan Alat Bantu	orang			10	10	35.460.278						12	12	39.006.305		
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang			2	2	-						2	2	-		
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang			265	265	379.419.268						292	292	417.361.195		

h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Lanjut Usia Terlantar	orang			29	29	17.487.857						31	31	19.236.643			
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	orang			69	69	-						76	76	-			
j	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar/Fasilitas layanan Kesehatan	orang			9	9	-						10	10	-			
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang			154	154	-						169	169	-			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang			109	109	-						120	120	-			
m	Layanan Rujukan	orang			11	11	8.800.000						12	12	9.680.000			
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang			0	0	-						0	0	-			
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan	orang			0	0	-						0	0	-			

	Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru																	
<b>4</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	orang	<b>1002</b>	<b>1002</b>			<b>2.289.332.726</b>		<b>APBD</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>1102</b>	<b>1102</b>			<b>2.518.265.999</b>		<b>APBD</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang			176	176	224.840.017						193	193	247.324.019			
b	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang			850	850	726.746.239						935	935	799.420.863			
c	Penyediaan Permakanan	orang			385	385	846.640.774						423	423	931.304.851			
d	Penyediaan Sandang	orang			810	810	371.105.306						891	891	408.215.836			
e	Penyediaan Alat Bantu	orang			0	0	-						0	0	-			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang			11	11	-						12	12	-			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang			27	27	38.016.469						29	29	41.818.116			
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Gelandangan dan Pengemis Terlantar	orang			20	20	12.561.700						22	22	13.817.870			
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau	orang			55	55	-						61	61	-			

	Kartu Identitas Anak																
j	Akses ke Layanan Pendidikan	orang			17	17	-					18	18	-			
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang			173	173	-					190	190	-			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang			186	186	-					204	204	-			
m	Layanan Rujukan	orang			119	119	69.422.222					131	131	76.364.444			
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pemeliharaan	orang			0	0	-					0	0	-			
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang			0	0	-					0	0	-			
5	<b>Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap</b>	orang	<b>5115</b>	<b>5115</b>			<b>903.188.224</b>		<b>APBD</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>5627</b>	<b>5627</b>		<b>993.507.047</b>		<b>APBD</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>

	<b>Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota</b>																	
a	Penyediaan Permakanan	orang			5115	5115	575.314.759						5627	5627	632.846.235			
b	Penyediaan Sandang	orang			376	376	112.359.336						414	414	123.595.270			
c	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	unit			0	0	-						0	0	-			
d	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	orang			1320	1320	109.716.130						1452	1452	120.687.743			
e	Pelayanan Dukungan Psikososial	orang			622	622	105.798.000						684	684	116.377.800			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2028)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2029)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran(Rp.)				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran(Rp.)			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial</b>		1435	1435			4.696.241.311		APBD	DINAS SOSIAL	1578	1578			5.165.865.442		APBD	DINAS SOSIAL
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang			32	32	272.056.421						35	35	299.262.063			
b	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang			108	108	92.460.981						119	119	101.707.079			
c	Penyediaan Permakanan	orang			476	476	1.048.129.759						524	524	1.152.942.735			
d	Penyediaan Sandang	orang			161	161	73.867.627						177	177	81.254.390			
e	Penyediaan Alat Bantu	pcs			1084	1084	2.724.590.423						1192	1192	2.997.049.465			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang			4	4	-						4	4	-			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang			286	286	409.489.550						315	315	450.438.505			

	dan Sosial																
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	orang			48	48	29.505.217					53	53	32.455.738			
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	orang			15	15	-					16	16	-			
j	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	orang			567	567	-					624	624	-			
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang			52	52	-					57	57	-			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang			27	27	-					29	29	-			
m	Layanan Rujukan	orang			67	67	46.141.333					73	73	50.755.467			
<b>2</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial</b>	orang	<b>338</b>	<b>338</b>			<b>886.456.860</b>		<b>APBD</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>372</b>	<b>372</b>		<b>975.102.546</b>		<b>APBD</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang			242	242	272.056.421					266	266	299.262.063			
b	Penyediaan Permakanan	orang			95	95	209.068.436					105	105	229.975.280			
c	Penyediaan Sandang	orang			218	218	100.110.074					240	240	110.121.081			
d	Penyediaan Alat Bantu	orang			0	0	-					0	0	-			
e	Penyediaan Perbekalan	orang			3	3	-					3	3	-			

	Kesehatan																
f	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang			46	46	65.843.033					51	51	72.427.337			
g	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Anak Terlantar	orang			35	35	21.756.372					38	38	23.932.009			
h	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang			5	5	-					6	6	-			
i	Akses ke Layanan Pendidikan	orang			4	4	-					4	4	-			
j	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang			89	89	-					98	98	-			
k	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang			114	114	-					126	126	-			
l	Layanan Rujukan	orang			24	24	18.929.778					26	26	20.822.756			
m	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang			232	232	198.692.747					256	256	218.562.021			
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan	orang			0	0	-					0	0	-			

	Pengadaan Kendaraan Baru																
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang			0	0	-					0	0	-			
<b>3</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial</b>	orang	<b>1435</b>	<b>1435</b>			<b>2.342.988.543</b>		<b>APBD</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>1578</b>	<b>1578</b>		<b>2.577.287.398</b>		<b>APBD</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang			195	195	272.056.421						214	214	299.262.063		
b	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang			228	228	194.758.237						251	251	214.234.061		
c	Penyediaan Permakanan	orang			560	560	1.233.503.772						617	617	1.356.854.149		
d	Penyediaan Sandang	orang			238	238	108.857.556						261	261	119.743.312		
e	Penyediaan Alat Bantu	orang			13	13	42.906.936						14	14	47.197.629		
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang			3	3	-						3	3	-		
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang			321	321	459.097.315						353	353	505.007.046		

h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Lanjut Usia Terlantar	orang			35	35	21.160.307						38	38	23.276.337			
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	orang			84	84	-						92	92	-			
j	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar/Fasilitasi layanan Kesehatan	orang			11	11	-						12	12	-			
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang			186	186	-						205	205	-			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang			132	132	-						145	145	-			
m	Layanan Rujukan	orang			13	13	10.648.000						15	15	11.712.800			
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang			0	0	-						0	0	-			
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan	orang			0	0	-						0	0	-			

	Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru																	
<b>4</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	orang	<b>1212</b>	<b>1212</b>			<b>2.770.092.599</b>		<b>APBD</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>1334</b>	<b>1334</b>			<b>3.047.101.858</b>		<b>APBD</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>
a	Layanan Data dan Pengaduan	orang			213	213	272.056.421						234	234	299.262.063			
b	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang			1029	1029	879.362.949						1132	1132	967.299.244			
c	Penyediaan Permakanan	orang			465	465	1.024.435.336						512	512	1.126.878.870			
d	Penyediaan Sandang	orang			980	980	449.037.420						1078	1078	493.941.162			
e	Penyediaan Alat Bantu	orang			0	0	-						0	0	-			
f	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang			13	13	-						15	15	-			
g	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang			32	32	45.999.927						35	35	50.599.920			
h	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Gelandangan dan Pengemis Terlantar	orang			24	24	15.199.657						26	26	16.719.623			
i	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau	orang			67	67	-						73	73	-			

	Kartu Identitas Anak																
j	Akses ke Layanan Pendidikan	orang			20	20	-					22	22	-			
k	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang			209	209	-					230	230	-			
l	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang			225	225	-					247	247	-			
m	Layanan Rujukan	orang			144	144	84.000.889					158	158	92.400.978			
n	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pemeliharaan	orang			0	0	-					0	0	-			
o	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang			0	0	-					0	0	-			
5	<b>Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap</b>	orang	<b>6684</b>	<b>6684</b>			<b>1.092.857.752</b>		<b>APBD</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	<b>7352</b>	<b>7352</b>		<b>1.202.143.527</b>		<b>APBD</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>

	<b>Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota</b>																
a	Penyediaan Permakanan	orang			6189	6189	696.130.858						6808	6808	765.743.944		
b	Penyediaan Sandang	orang			455	455	135.954.797						501	501	149.550.276		
c	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	unit			0	0	-						0	0	-		
d	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	orang			1597	1597	132.756.517						1757	1757	146.032.168		
e	Pelayanan Dukungan Psikososial	orang			752	752	128.015.580						827	827	140.817.138		

## **BAB IV**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM**

#### **4.1. Pemantauan dan Evaluasi SPM**

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. **Penggunaan Sumber Daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. **Penyampaian Perkembangan Hasil**, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. **Pelaku Kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. *Ketaatan/compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

- b. Pemeriksaan/*auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. Laporan/*accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kota Bandung, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di crosscheck apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

**a. Kebijakan Daerah.**

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:

- 1) Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?

- 2) Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
- 3) Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
- 4) Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar.

Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:

- a) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing- masing bidang SPM?
- b) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
- c) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
- d) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

**b. Koordinasi.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:

- 1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
- 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
- 3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

- 5) Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

**c. Manajemen Kerja.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:

- 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
- 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

**d. Pendanaan.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:

- 1) Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
- 2) Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
- 3) Apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara variabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?

- 4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
- 5) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
- 6) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbans pada berapa banyak warga yang terlayani?
- 7) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Evaluasi pencapaian indikator SPM**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	IndikatorSPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan.

Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, stakeholder terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

#### **4.2. Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

**a. Indeks Pencapaian SPM.** Bagian ini akan menganalisis Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

- 1) Analisis identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
- 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan
- 3) SPM atas terget yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

**b. Anggaran SPM.** Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

- 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
- 2) Bagaimana SPM diposisikan?

- 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
- 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
- 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

**c. Permasalahan SPM.** Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

- 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
- 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
- 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, memuat terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

#### **5.2. Saran**

- 1) Tim penerapan SPM Pemerintah Kota Bandung secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh Bagian Tata Pemerintah Setda Kota Bandung, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
- 2) Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama Corporate Social Responsibility (CSR) dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks Pencapaian SPM di Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002